



LAPORAN AKSI PERUBAHAN MINAESA RANCAKBANA KARANTINA SUMATERA BARAT

Transformasi Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

oleh: **RM Ende Dezeanto, S.St.Pi**
NDH.31 / PKA.X

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

MINAESA RANCAK BANA

KARANTINA SUMATERA BARAT

(Monitoring Information of National Quarantine Single data)

(Transformation of Smart Budget, Accountability and Transparency)

Karantina Sumatera Barat



OLEH :

RM ENDE DEZEANTO, S.St.Pi

NIP 197812282002121003 / NDH 31

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X

BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

SUMATERA BARAT

2025

LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR, COACH, DAN PENGUJI

Judul : “**Minaesa Rancak Bana** Karantina Sumatera Barat”
Monitoring Information of National Quarantine Single Data
tRansformasi **AN**ggaran **C**erdas, **A**kun**ta**Bel dan **trAN**spAran
Karantina Sumatera Barat

Nama : RM Ende Dezeanto, S.St.Pi

NIP : 197812282002121003

Jabatan : Kepala Balai

Unit Kerja : Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

Telah diseminarkan di depan Tim Penguji pada hari Selasa, 9 Desember 2025.

Mentor



N. Prayatno Ginting, S.P., M.M.
NIP 197007021998031003

Pembimbing/Coach



Irfan Arifdharma, S.Sos, M.M
NIP 197305091998031001

Penguji I



Iswarayuda Bayu Agutama, ST.,M.Eng
NIP 198108282009121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Monitoring Information of National quarantine Single data, transformasi Anggaran Cerdas, Akuntabel dan transparan Karantina Sumatera Barat atau selanjutnya disingkat menjadi **Minaesa Rancak Bana Karantina Sumatera Barat** adalah inisiatif digital transformatif yang menjadi langkah maju signifikan bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Aplikasi ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi kompleksitas dan inefisiensi dalam pengelolaan tata keuangan. Selama ini, BKHIT Sumatera Barat menghadapi tantangan signifikan karena proses pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai masih dilakukan secara manual, sebuah sistem usang yang tidak hanya memperlambat alur kerja tetapi juga berpotensi mengorbankan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Proses berbasis kertas ini menciptakan hambatan administrasi yang membuang waktu dan sumber daya berharga yang seharusnya difokuskan pada tugas inti karantina.

Aplikasi **Minaesa Rancak Bana Karantina Sumatera Barat** hadir sebagai solusi cerdas dan komprehensif, mentransformasi birokrasi manual yang lambat menjadi ekosistem digital yang efisien dan cepat. Aplikasi ini memberikan kemudahan luar biasa bagi seluruh pegawai, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan mengunggah dokumen dan bukti pengeluaran secara digital, di mana saja dan kapan saja. Dampak positifnya segera terasa, menghilangkan ketergantungan pada berkas fisik dan mempersingkat waktu pemrosesan secara drastis.

Lebih dari sekadar mempermudah pegawai, inovasi ini adalah katalis bagi Tim Keuangan. Dengan **Minaesa Rancak Bana**, Tim Keuangan kini memiliki akses terpusat ke seluruh data dan berkas pertanggungjawaban, memastikan setiap transaksi dapat dilacak, diverifikasi, dan diaudit dengan kecepatan dan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Integrasi digital ini secara fundamental memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan visi transformasi digital Badan Karantina Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat sehat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Rencana Aksi Perubahan yang berjudul **“MINAESA (Monitoring Information of National quarantine Single data) RANCAKBANA (tRansformasi ANggaran Cerdas, AKuntaBel dan trANspAran) “di Karantina Sumatera Barat.**

Permasalahan yang saat ini terjadi diharapkan terlaksananya penyelenggaraan keuangan khususnya Pertanggung jawaban dan dokumentasi anggaran yang Akuntabel, Cepat dan Transparan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dilakukan proses penyimpanan dokumen melalui portal. Guna mendukung hal tersebut, penulis telah melakukan diskusi dengan mentor dan juga arahan dari Kepala Badan Karantina Indonesia terkait bahwa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yg tertib ini adalah Pengembangan Sistem Minaesa Rancakbana ini untuk terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan serta meningkatkan layanan pemerintahan yang cepat, inovatif dan akuntabel melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan baik di Balai Karantina Sumatera Barat, yang saat ini belum tersedia sehingga proses nantinya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sahat Manaor Panggabean selaku Kepala Badan Karantina Indonesia yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKA Angkatan X di Ciawi Bogor;
2. Bapak N. Prayatno Ginting, S.P, M.M Kepala Balai Besar Karantina Indonesia Sumatera Utara yang telah dipercayakan sebagai mentor untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis;

3. Bapak Irfan Arifdharma, S.Sos.,MM selaku Coach yang telah memberikan petunjuk, panduan, dan bimbingan atas penulisan Rancangan aksi perubahan;
4. Istri tercinta, Sri Lestari serta anak-anak penulis yang luar biasa RA Deanisha Bijaksana, RM. Dhito Wicaksana yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal;
5. Kasubbag Umum, Tim Kerja Karantina Hewan, Tim Kerja Karantina Ikan, Tim Kerja Karantina Tumbuhan, Tim Kerja Penegakan Hukum, Penanggung Jawab Satuan Pelayanan dan Tim Efektif Penyusunan Aksi Perubahan di Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam mencari dan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan ini;
6. Rekan-rekan Keluarga Besar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan rancangan aksi perubahan ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat pada unit kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat .

Ciawi, Desember 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR, COACH, DAN PENGUJI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	5
C. MANFAAT	7
D. RUANG LINGKUP	7
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN KINERJA ORGANISASI.....	8
A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	8
B. PENGELOLAAN NILAI BUDAYA KERJA ORGANISASI	12
C. PENGELOLAAN TIM	14
D. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI	15
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN KINERJA ORGANISASI.....	18
A. CAPAIAN DAN PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI	18
B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	22
C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN, SERTA KETERKAITAN MATA PELATIHAN (MANFAAT) DENGAN AKSI PERUBAHAN	24
BAB IV DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN.....	30
A. DISEMINASI/PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	30
B. KEBERHASILAN MENDAPATKAN DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN	31
BAB V KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI.....	35
A. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI	35

- B. TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN JANGKA MENENGAH (6 BULAN)
36

BAB VI PENUTUP	37
KESIMPULAN	38
SARAN DAN MASUKAN	38
DAFTAR PUSTAKA	40
PROFIL	42
FORM DATA MENTOR	43
TABEL KEGIATAN	44
LAMPIRAN FOTO	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Strategi Komunikasi Kelompok Stakeholder	15
Tabel 3.1 Tabel Keuntungan Penerapan Aplikasi Minaesa Rancak Bana.....	22
Tabel 3.2 Manfaat Aplikasi Minaesa Rancak Bana bagi Stakeholders	23
Tabel 3.3 Strategi Pengembangan Kompetensi.....	27
Tabel 3.4 Identifikasi/Daftar Risiko	28
Tabel 3.5 Manajemen Risiko Implementasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana.....	29
Tabel 4.1 Sarana Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan	30
Tabel 4.2 Dukungan dari Stakeholders	32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.....	9
Gambar 3.1 Milestone.....	18
Gambar 3.2 Alur Proses Bisnis.....	20
Gambar 3.3 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Potensi Diri	25
Gambar 3.4 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	25
Gambar 3.5 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor	26
Gambar 4.1 Peta Stakeholder	33
Gambar 5.1 Milestone Jangka Menengah	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Aparatur Negara yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia, yang tertuang dalam Asta Cita Presiden, **khususnya butir ketujuh**, yaitu **"Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba"**. Butir ini menekankan pada terwujudnya Reformasi Birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional, yang mampu mendukung percepatan pembangunan nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati Indonesia dari masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, serta jasad renik patogenik. Tugas pokok dan fungsi BKHIT Sumatera Barat diatur dalam **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019** tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang bertujuan untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), serta mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, BKHIT Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal dan internal yang memerlukan analisis mendalam dan perencanaan strategis

Tabel 1.1 Analisis Lingkungan Eksternal berbasis Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Enviromental dan Legal (PESTEL)

	Kondisi	Dampak
1. Politik (Political)	- Ancaman Geopolitik yang makin tegang saat ini mempengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan Negara yang dapat menimbulkan ancaman Defisit Anggaran pendapatan Belanja Negara - Arah kebijakan Presiden melalui Asta cita salah satunya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba - Transparansi keuangan merupakan bagian penting untuk menjaga legitimasi politik dan stabilitas Negara. Tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi semakin kuat	- Penyelenggaraan keuangan yang bersih dan transparan merupakan bagian penting untuk menjaga legitimasi politik dan stabilitas Negara, serta meningkatkan kepercayaan 2ublic terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat posisi politik Indonesia di mata dunia - Birokrasi dituntut semakin adaptif dan netral.
2. Ekonomi (Economic)	- Pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi faktor global (inflasi, krisis energi, harga pangan, Penerapan tarif impor Negara lain). - Anggaran negara terbatas sementara kebutuhan pembangunan meningkat.	- Instansi pemerintah harus meningkatkan efisiensi anggaran. - Prioritas belanja negara makin ketat, sehingga birokrasi harus lebih akuntabel

3. Sosial (Social)	▪ Masyarakat semakin kritis, menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas pungli ▪ Perubahan demografi: generasi muda (millennials & Gen Z) lebih menuntut transparansi dan digitalisasi	▪ Tekanan publik mendorong instansi pemerintah memperbaiki pelayanan ▪ Jika birokrasi lambat, akan menurunkan kepercayaan publik
4. Teknologi (Technological)	▪ Makin cepatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sektor publik menuntut Instansi pemerintah terus adaptif mengikuti perkembangan teknologi.	▪ Instansi Pemerintah yang cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan lebih efisien, dan yang lambat akan tertinggal dan dianggap tidak relevan.
5. Lingkungan (Environmental)	▪ Isu perubahan iklim, bencana alam, dan krisis energi makin menekan kebijakan publik. ▪ Pemerintah dituntut mengalokasikan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan (<i>green economy</i>)	▪ Instansi pemerintah harus menyesuaikan program dengan agenda pembangunan hijau dan hemat energy ▪ Kegagalan merespons isu lingkungan berpotensi memicu kritik masyarakat dan internasional
6. Hukum (Legal)	▪ Regulasi tata kelola pemerintahan semakin ketat seperti UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi ▪ Tuntutan kepatuhan hukum dan integritas makin tinggi	▪ Penyelenggaraan keuangan yang bersih, cepat, Transparan dan akuntabel adalah kewajiban hukum sesuai prinsip good governance

Kesimpulan :

- Faktor eksternal menunjukkan tuntutan semakin besar terhadap birokrasi yang bersih, transparan, digital, responsif, dan ramah lingkungan.
- Peluang: digitalisasi, dukungan politik untuk reformasi birokrasi, agenda pembangunan berkelanjutan.
- Ancaman: keterbatasan anggaran, dinamika politik, resistensi perubahan, serta risiko rendahnya kepercayaan publik.
- Implikasi: Instansi pemerintah harus mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, mengoptimalkan teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif

Berdasarkan analisis PESTEL kondisi pemerintahan saat ini dituntut adanya Pelayanan Pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi, khususnya Keuangan yang Akuntabel dan Transparan. Setiap kegiatan penyelenggaraan instansi tentu memerlukan pembiayaan anggaran, untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi salah satunya yaitu Pemerintahan yang bersih bebas KKN, tentu pembiayaan anggaran instansi harus di selenggarakan dengan baik. Pembiayaan anggran instansi meliputi Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan pembayaran keuangan Negara, Pelaporan keuangan dan Inventaris, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan. Indikator sasaran ke-2 dari Prioritas Nasional ke -7 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani diantaranya adalah Indek Reformasi Birokrasi Nasional yang ditargetkan nilainya 71,38 di tahun 2025 dan di tahun 2029 ditargetkan mencapai 77,26.

Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi adalah: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan Indikatornya yaitu Indek Persepsi Korupsi dan Opini BPK dengan predikat WTP, 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikatornya integritas Pelayanan Publik serta Peringkat Kemudahan Berusaha, 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikatornya Indeks Efektivitas Pemerintahan serta nilai instansi pemerintah yang akuntabel.

Melihat dari sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi sebagian besar berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan Negara yang baik, serta sesuai dengan arahan Kebijakan Badan Karantina Indonesia yaitu : 1. Penguatan Kompetensi SDM, 2. Revitalisasi Laboratorium, 3. Digitalisasi Layanan. Selain kompetensi Teknis dalam penyelenggaraan Karantina tentu juga perlu penguatan kompetensi SDM dalam dukungan manajemen untuk menunjang terselenggaranya perkarantinaan yang baik, dalam Revitalisasi Laboratorium pasti juga perlukan tata kelola keuangan yang akuntabel dalam perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, peralatan dan bahan laboratorium, serta Digitalisasi Layanan tidak hanya penyelenggaraan pelayanan keluar tetapi juga layanan internal guna menunjang layanan karantina yang baik. sehingga Fokus utama perubahan ini adalah pada penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai langkah awal mewujudkan birokrasi yang bersih dan baik (*clean government* dan *good governance*) melalui penerapan teknologi informasi guna monitoring penyelenggaraan birokrasi instansi dalam satu data di Badan Karantina Indonesia atau Monitoring Information of National Quarantine Single data

B. TUJUAN

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan baik melalui tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

Tujuan Jangka Pendek : Terlaksananya penyelenggaraan keuangan khususnya Pertanggung jawaban dan dokumentasi anggaran yang Akuntabel, Cepat dan Transparan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

Capaian Jangka Pendek : Dengan Implementasi Minaesa Rancak Bana permasalahan dalam tata kelola keuangan terkait akuntabilitas dapat terbantu karena semua dokumen pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas tersimpan dalam satu database, dengan penerapan sistem ini dimana seluruh

pegawai dapat memantau proses pengajuan pertanggung jawaban serta bila ada yang tidak sesuai hasil verifikasi oleh verifikator dapat segera diperbaiki oleh pegawai sesuai dengan keterangan atau catatan yang disampaikan secara sistem sehingga transparansi keuangan dapat terlaksanakan sekaligus sebagai kontrol untuk kinerja layanan internal dalam tata kelola keuangan khususnya perjalanan dinas, permasalahan adanya dokumen kelengkapan keuangan seperti daftar nominatif dan kuitansi yang biasanya belum ditanda tangani oleh pegawai dapat secara otomatis terselesaikan dengan pencetakan kuitansi oleh pegawai sendiri dan ditandatangani langsung oleh pegawai saat pengajuan kelengkapan berkas keuangan perjalanan dinas.

Tujuan Jangka Menengah : Terwujudnya tata kelola Birokrasi yang bersih, Akuntabel dan Transparan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

Capaian Jangka Menengah : Dengan terselesaikannya sebagian permasalahan akuntabilitas keuangan khususnya pertanggung jawaban perjalanan dinas, mampu mendorong terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan di BKHIT Sumatera Barat. Hal ini tentu butuh konsistensi pelaksanaan dan kelanjutan pengembangan menu Aplikasi sesuai yang telah direncanakan

Tujuan Jangka Panjang : Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang cepat, Inovatif dan Akuntabel melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan baik di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

Capaian Jangka Panjang : Hal ini membutuhkan pembuktian untuk dapat menjawab tantangan diantaranya kecepatan dan kerapian pemenuhan permintaan data dan audit baik internal maupun dari lembaga pemeriksa atau eksternal

C. MANFAAT

Melalui Implementasi Kepemimpinan Transformasi Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel diharapkan meningkatkan Layanan Pemerintahan yang bersih dan baik di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Dengan Manfaat Aksi Perubahan sebagai berikut:

1. Manfaat Internal

- a. Mempercepat proses Pengajuan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Pegawai
- b. Mempermudah Verifikasi dan pemenuhan kelengkapan dokumen keuangan dalam proses pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas pegawai
- c. Mempermudah penelusuran data/informasi keuangan khususnya perjalanan Dinas pegawai serta monitoring capaian keuangan.
- d. Sebagai satu wadah/single data arsip keuangan dan *evidence* Pertanggung jawaban keuangan.

2. Manfaat Eksternal

Mempercepat pemenuhan kebutuhan atau permintaan data/informasi keuangan dari lembaga pengawas atau auditor seperti Inspektorat, BPK, BPKP dll.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Aksi Perubahan dalam pembelajaran kepemimpinan ini terbatas pada tata kelola keuangan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Harapan Kedepan Aksi Perubahan dapat dikembangkan untuk mendorong layanan birokrasi yang bersih, akuntabel, Transparan di semua bagian.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN KINERJA ORGANISASI

A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan karantina Indonesia yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan dipimpin oleh Kepala Balai.

1. Tujuan Penyelenggaraan Karantina

1. Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan dan;
5. Mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi

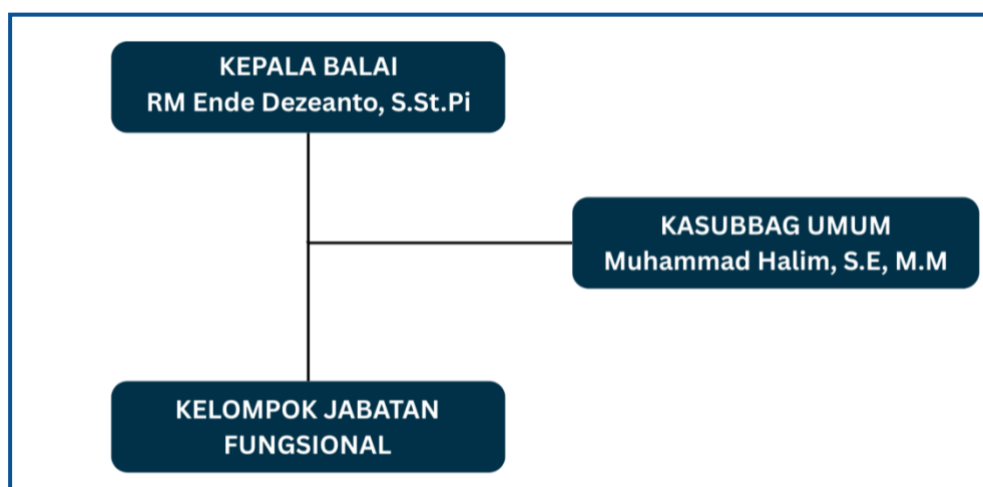
Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

Misi

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Pembentukan Badan Karantina Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 Pasal 8, dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT di jabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

Sub Bagian Umum melaksanakan administrasi perkantoran dan dukungan manajemen dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Karantina yang terdiri atas beberapa kelompok kegiatan : Keuangan, Pelengkapan, Kepegawaian, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Arsip dan Tata Usaha Persuratan. Kelompok jabatan Fungsional Melaksanakan Tindakan Karantina yang terdiri atas Tim Kerja : Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan serta Penegakan Hukum.

2. Kontrak Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Kontrak Kerja Kepala Balai dengan Kepala Badan Karantina Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat, Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat terdiri :

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang professional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan humas yang baik
4. Terlaksananya Penindakan Kasus Pelanggaran (P21)
5. Terwujudnya layanan keuangan yang baik
6. Terwujudnya tata kelola perencanaan anggaran yang baik

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, bahwa keseluruhan point dalam Perjanjian Kerja tersebut telah terpenuhi seluruhnya dengan jumlah capaian realisasi melebihi target yang ditetapkan, hal ini menandakan bahwa kinerja BKHIT Sumatera Barat baik berdasarkan indicator target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan aspek layanan keuangan yang baik bahwa IKPA sampai saat ini Juli 2025, BKHIT Sumatera Barat berdasarkan Monitoring IKPA KPPN Padang masuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai akhir 95,57. Namun disamping indikator kinerja tersebut, hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2024 di Kantor Pusat dan UPT lingkup Barantin bahwa Badan Karantina Indonesia mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. Implementasi Aksi Perubahan dalam Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a. Integritas

Penerapan prosedur pengajuan pertanggung jawaban melalui sistem minaes a rancak bana dapat mendorong integritas seluruh pegawai yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap instansi melalui pemerintahan yang bersih.

b. Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan tata kelola pertanggung jawaban yang tersistem dan arsip yang rapi, verifikasi dan monitoring tersistem meningkatkan akuntabilitas dan transparansi instansi yang pada akhirnya diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.

Ciri Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

❖ Akuntabel

- Pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Setiap penggunaan anggaran didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan hasil (value for money).
- Adanya mekanisme audit internal dan eksternal (oleh APIP, BPK).
- Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah.
- Ada sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran (prinsip reward and punishment).
- Orientasi tidak hanya pada kepatuhan administrasi, tetapi juga pada capaian kinerja (outcome oriented accountability).

❖ Transparan

- Informasi keuangan disampaikan secara terbuka kepada publik.
- Laporan keuangan mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.
- Adanya keterbukaan anggaran sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- Menggunakan sistem berbasis teknologi (misalnya e-budgeting, e-reporting) agar data real-time dan dapat diawasi.

- Masyarakat memiliki ruang partisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran

Secara Umum Pengelolaan Keuangan yang Transparansi dan Akuntabel cirinya adalah : 1. Laporan Keuangan yg mudah diakses, 2. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan, 3. Pencatatan Keuangan yang sesuai Standar, 4. Informasi Kinerja yang jelas dan 5. Sistem Informasi yang handal.

B. PENGELOLAAN NILAI BUDAYA KERJA ORGANISASI

1. Partisipatif

Minaesa Rancak Bana di bangun dengan salah satu nilai budaya kerja partisipatif dari seluruh pegawai BKHIT Sumatera Barat, setiap pegawai harus turut aktif berpartisipasi atas nama pribadi melalui akun pegawai masing2 untuk mengajukan laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas. Apabila ada pegawai yg tidak berpartisipasi proses pengajuan pertanggung jawaban perjalanan dinas tidak berjalan, apalagi bila pegawai tersebut dalam satu tim tentu seluruh tim dalam surat tugas tersebut terdampak tidak bisa mengajukan Pertanggung jawaban keuangan.

2. Mandiri

Seluruh pegawai dituntut dan di dorong untuk dapat mengisi data pertanggung jawaban perjalanan dinas secara mandiri melalui akun pegawai masing2, setelah selesai melaksanakan tugas perjalanan dinas setiap pegawai dapat menyusun laporan pertanggung jawaban dalam sistem Minaesa Rancak Bana yg telah memiliki data base SBM sehingga akan memudahkan seluruh pegawai dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas. Dengan sistem akun pribadi, seluruh pegawai d BKHIT Sumatera Barat di tuntut untuk dapat bekerja mandiri dan aktif.

3. Transparan

Melaui Minaesa Rancak Bana setiap pegawai dapat mengetahui nilai pengajuan pertanggung jawaban perjalanan dinas karena nilai nominal pertanggung jawaban perjalanan dinas disusun sendiri oleh pegawai masing-masing, disamping itu pegawai juga dapat memonitor proses pengajuan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas melalui akun pribadi

pegawai, dengan mudah, karena sudah tersedia keterangan tahapan proses pengajuan. Dengan Transparansi tatakelola keuangan di harapkan dapat menciptakan tatakelola pemeribhtahan yang bersih dan baik.

4. Akuntabel

Melalui aplikasi Minaesa Rancak Bana setiap kegiatan perjalanan dinas dari pengajuan permohonan surat tugas, penerbitan surat tugas, laporan surat tugas sampai kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan dinas semua tersimpan dan terdata dalam satu sistem, halini memudahkan instansi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja arsip keuangan perjalanan dinas.

5. Modern

Penggunaan perkembangan Teknologi informasi melalui pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana diharapkan dapat memajukan proses layanan pemerintah dalam halini layanan internal di BKHIT Sumatera Barat, serta meningkatkan kecakapan pegawai pemerintah mengikuti perkembangan jaman. Hal ini merupakan wujud nyata dari salah satu dari 3 program prioritas Kepala Badan Karantina Indonedia yaitu digitalisasi layanan.

6. Efisien

Aplikasi Minaesa Rancak Bana dapat di akses dimana saja secara online sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menumbuhkan budaya kerja efisien, melalui sistem ini dalam pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas pegawai dapat mengajukan dari tempat kerja masing2 secara online dan dokumen kelengkapan dapat langsung di cetak dan di tanda tangani langsung oleh pegawai, selain itu jumlah dokumen yg di cetak juga jadi berkurang sehingga penggunaan kertas di kantor juga berkurang sehingga dapat menurunkan jumlah kebutuhan ATK.

7. Role Model Komitmen Kepemimpinan

Aplikasi Minaesa Rancak Bana bukan hanya inovasi teknologi tetapi komitmen pimpinan dalam Akuntabilitas dan Transparansi tata kelola keuangan, sekaligus bukti nyata bagi seluruh pegawai untuk mewujudkan birokrasi bersih melayani.

C. PENGELOLAAN TIM

Dalam Mewujudkan Aksi Perubahan dibutuhkan tim kerja yang efektif sesuai dengan permasalahan dan solusi yang disusun untuk itu dibentuk Tim Efektif yang terdiri atas unsur-unsur di dalam Instansi yang dikelompokkan dalam kelompok kerja untuk memduahkan penyusunan dan pembangunan sistem Tatakelola Keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga terbentuk dalam satu aplikasi Minaesa Rancak Bana. Tim Kerja yang terdiri dari beberapa kelompok tim didalamnya terdapat Tim Teknis Keuangan, Tim Administrasi & Dokumentasi, Tim IT dan Tim Desain & Strategi Komunikasi. bekerja dengan dibagi tugas masing-masing dalam teamline yang ditentukan dan berkumpul untuk rapat secara berkala baik secara langsung maupun online melalui Google Meet disela kesibukan tugas masing-masing

Keberhasilan Aksi Perubahan dengan telah tersusunnya aplikasi dan terlaksananya dalam implementasi kegiatan perkantoran tidak lepas dari dukungan oleh Coach, Mentor, Pimpinan Tinggi Badan karantina Indonesia dan seluruh pegawai BKHIT Sumatera Barat melalui komitmen yang kuat untuk terwujudnya proses perubahan, dalam hal ini adalah keuangan akuntabel dan transparan yang dimulai dari Pimpinan tertinggi di BKHIT Sumatera Barat.

Dalam menjamin pelaksanaan sistem berdasarkan kajian risiko dalam manajemen risiko pada tingkat pelaksanaan sistem aplikasi dibentuk satu tim agen perubahan yang ditunjuk dari berbagai bidang pada lokasi kerja yang berbeda. Agen perubahan ini nantinya akan mengawal pelaksanaan implementasi di tingkat lapangan yang membantu pegawai di lokasi kerja yang berbeda-beda apabila ada pegawai yang mengalami kendala dalam proses penginputan dalam sistem Aplikasi. Tim Agen Perubahan ini dipilih pegawai yang dianggap cakap, adaptif, dan responsif untuk diberikan pembekalan terkait implementasi sistem Aplikasi Minaesa Rancak Bana, sehingga kendala penginputan oleh pegawai dapat segera diselesaikan ditingkat lapang.

D. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi dalam penyusunan sistem aplikasi dan proses implementasi mengikuti yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan hasil yang diharapkan, hasil komunikasi selalu dievaluasi untuk mendapatkan yang diharapkan.

Strategi Komunikasi dalam Penyusunan Sistem Minaesa Rancak Bana untuk memastikan tim kerja berjalan sesuai dengan tugas dan waktu penyelesaian dibuatkan pembagian tugas dan skala prioritas dengan tenggat waktu yang disepakati secara bertahap. Setiap tahapan akan ditetapkan waktu penyelesaian dan jadwal pertemuan untuk membahas hasil pada masing-masing kelompok tim kerja. Mekanisme rapat dilakukan dengan pertemuan secara langsung dan juga online, karena disela pekerjaan diakhir tahun yang juga makin meningkat sehingga pertemuan secara langsung bila harus berkumpul semua tidak bisa maka dilakukan pertemuan online dengan google meet dan setiap kelompok menyampaikan progres perkembangan dari tahapan masing-masing.

Tabel 2.1 Strategi Komunikasi Kelompok Stakeholder

Stakeholder	Karakteristik	Kelompok	Strategi
● Kepala BKHIT Sumatera Utara ● Kepala BKHIT Sumatera Barat ● Kasubbag Umum BKHIT Sumatera Barat ● Tim Kerja	Pengaruh/ kekuatan Tinggi dan minat terhadap perubahan sangat tinggi	Key Players	Libatkan secara penuh, komunikasi secara teratur, dan alokasi sumber daya untuk mempertahankan keterlibatan aktif
● Kepala Barantin ● Inspektorat Barantin ● Biro Keuangan Barantin ● Biro Perencanaan	Pengaruh/ kekuatan Tinggi dan minat terhadap perubahan tetapi tidak terlalu tertarik dengan detail program perubahan	Keep Satisfied	Pertahankan keterlibatan mereka untuk memastikan dukungan tetap ada, berikan informasi yang cukup sgsr tetap

dan Kerjasama Barantin			pusd dan tumbuh minat yang tinggi
Seluruh Pegawai BKHIT Sumatera Barat	Memiliki minat dan keterkaitan sangat tinggi namun pengaruh terhadap organisasi kurang.	Keep Informed	Berikan Informasi secara teratur dan konsisten sesuai kebutuhan untuk menjaga keterlibatan dan kesuksesan program perubahan serta mendapatkan umpan balik
• KPPN • BPK • APH	Pihak yg memiliki minat dan pengaruh yg rendah terhadap perubahan	Crowd	Perlu diberikan informasi secara umum mengenai hal-hal penting. Namun, perlu di pantau umpan balik dan perubahan minat mereka

Strategi Komunikasi dalam Implementasi berdasarkan kajian risiko bahwa keberhasilan aksi perubahan dapat berjalan faktor utama setelah sistem yang disusun adalah partisipasi pegawai. Untuk itu pemahaman seluruh pegawai terhadap aksi perubahan menjadi hal wajib, komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi terhadap pegawai, penyampaian tentang aksi perubahan dalam amanat apel, pembuatan media informasi berupa x-banner yang dipasang di kantor dengan disertakan barcode link aplikasi, dan untuk mengawal keberhasilan implementasi ditunjuk beberapa pegawai sebagai agen perubahan, agen perubahan ini yang akan mendapatkan pembelajaran lebih intensif dan bertugas menyebarkan dan membantu kepada pegawai disekitarnya ditempatnya bekerja sehingga apabila ada kendala dari pegawai yang kurang mengerti dalam input aplikasi bisa langsung dibantu oleh pegawai yang lebih mengerti dalam hal yg telah ditunjuk sebagai agen perubahan. Selain itu juga dibuatkan video aksi perubahan.

Pemanfaatan Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia: Membentuk tim inti yang terdiri dari Pejabat Keuangan, Bendahara, PPK, Staf IT, dan perwakilan unit kerja. Memanfaatkan kapasitas internal untuk menghindari tambahan biaya.
- Sumber Daya Teknologi: Memanfaatkan infrastruktur existing (cloud storage seperti Google Drive/SharePoint untuk e-arsip, aplikasi no-code untuk development) untuk efisiensi biaya dan waktu.
- Sumber Daya Finansial: Mengalokasikan dana dari anggaran operasional yang sudah ada untuk kebutuhan pelatihan dan subscription platform pengembangan aplikasi sederhana jika diperlukan. Mengutamakan solusi cost-effective.
- Pemanfaatan: Seluruh sumber daya dipetakan dan dimanfaatkan secara optimal dengan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif seluruh pegawai.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN KINERJA ORGANISASI

A. CAPAIAN DAN PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

Pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek telah menghasilkan sejumlah capaian penting yang secara langsung memperbaiki kinerja BKHIT Sumatera Barat. Meskipun masih berada pada tahap inisiasi, dampak jangka pendek ini sudah memperkuat fondasi peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam monitoring dan evaluasi laporan perjalanan.

Pelaksanaan aksi perubahan ini dilakukan dalam 8 tingkatan, yaitu (1) Konsultasi dan Koordinasi, (2) Pembentukan Tim, (3) Penyusunan SOP, (4) Pembentukan Aplikasi, (5) Uji Coba, (6) Sosialisasi, (7) Evaluasi, dan (8) Penerapan Aplikasi.



Gambar 3.1 Milestone

1. Konsultasi dan Koordinasi

Konsultasi adalah proses meminta arahan, klarifikasi, atau masukan dari pihak yang memiliki kewenangan atau kompetensi tertentu agar kegiatan dapat berjalan sesuai standar. Koordinasi adalah upaya menyelaraskan kegiatan antar pihak yang terlibat agar pelaksanaan program berjalan efektif, teratur, dan mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan aksi perubahan, tim telah melaksanakan kegiatan konsultasi dengan pihak terkait guna mendapatkan arahan teknis. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan unit-unit terkait untuk menyelaraskan pembagian tugas, serta kebutuhan data base. Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, diperoleh kesepahaman bersama yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

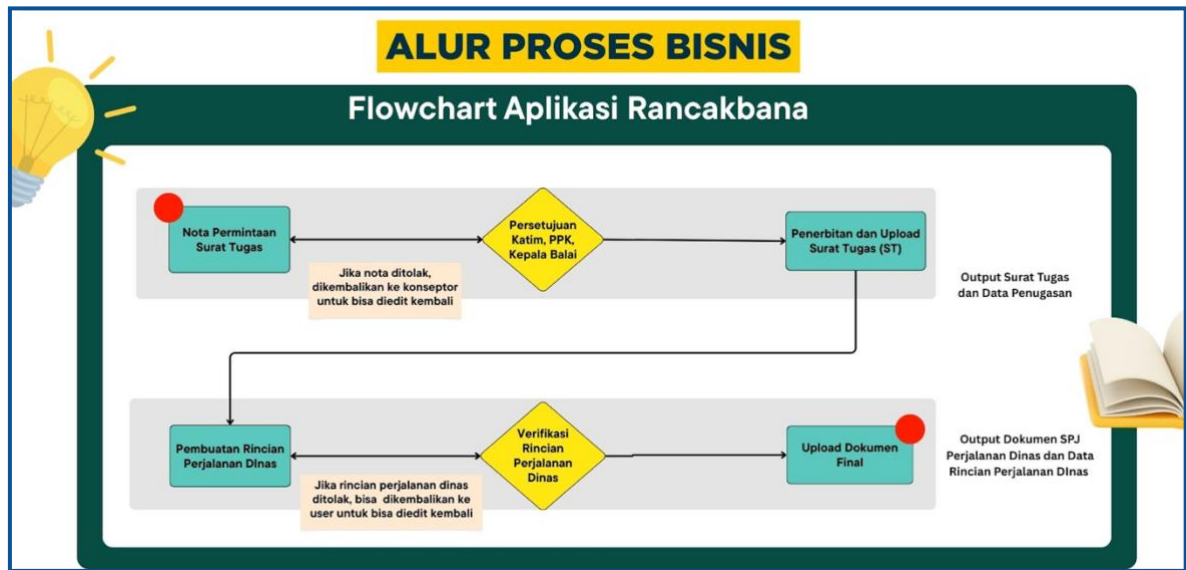
2. Pembentukan Tim

Pembentukan tim adalah proses menetapkan sekelompok orang dengan peran dan tanggung jawab tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan, proyek, atau program agar berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi aplikasi Mianesa Rancak Bana, telah dibentuk Tim Efektif melalui penetapan Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Nomor 3064 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana (terlampir). Tim ini bertugas melakukan perencanaan, koordinasi, pengumpulan data base, serta pelaporan kegiatan. Pembentukan tim ini dimaksudkan agar seluruh proses dapat berjalan terstruktur, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

3. Penyusunan SOP

Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah proses merancang, memformalkan, dan mendokumentasikan langkah-langkah kerja yang baku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan sesuai ketentuan.



Gambar 3.2 Alur Proses Bisnis

4. Pembentukan Aplikasi

Pembentukan aplikasi adalah proses merancang, mengembangkan, dan menyiapkan sebuah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan operasional, pelayanan, atau pengelolaan data dalam suatu unit/instansi

Pembentukan aplikasi Minaesa Rancak Bana dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja di lingkungan BKHIT Sumatera Barat. Proses pembentukan aplikasi dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan desain sistem, hingga pengembangan fitur sesuai alur operasional yang berjalan. Selanjutnya, dilakukan uji coba internal untuk memastikan setiap fungsi berjalan secara optimal. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sebelum aplikasi dinyatakan siap untuk diimplementasikan. Dengan terbentuknya aplikasi ini, diharapkan proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terstandarisasi.

5. Uji Coba

Uji coba adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem berjalan sesuai fungsi sebelum diterapkan secara penuh kepada seluruh pengguna aplikasi Minaesa Rancak Bana

Uji coba aplikasi Minaesa Rancak Bana dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan 26 Oktober 2025. Uji coba ini melibatkan Tim BKHIT Sumatera Barat dan Programmer. Uji coba ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas, kecepatan akses, serta kesesuaian alur kerja dengan kebutuhan operasional.

Secara umum, aplikasi dapat berfungsi dengan baik, meskipun terdapat beberapa masukan terkait tampilan dan navigasi yang perlu disempurnakan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi siap masuk ke tahap implementasi dengan beberapa perbaikan minor.

6. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan penyampaian informasi kepada pegawai atau pihak terkait mengenai suatu program, kebijakan, aplikasi, atau prosedur baru agar mereka memahami dan dapat menerapkannya dengan benar

Sosialisasi aplikasi Minaesa Rancak Bana dilakukan pada tanggal 24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat. Sosialisasi ini mengundang seluruh pegawai untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Pada saat sosialisasi dijelaskan tentang maksud dan tujuan pembuatan aplikasi Minaesa Rancak Bana dan demo aplikasi yang langsung di uji coba oleh seluruh pegawai.

7. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas, kelayakan, dan tingkat keberhasilan dari penerapan aplikasi Minaesa Rancak Bana. Pada tahap ini, Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Minaesa Rancak Bana yang digunakan oleh pegawai BKHIT Sumatera Barat. Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Nomor 3698 tanggal 20 November 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan (terlampir), maka dibentuklah satuan gugus tugas Agen Perubahan yang akan mendampingi pegawai BKHIT Sumatera Barat dalam pengoperasian aplikasi Minaesa Rancak Bana.

8. Penerapan Aplikasi

Proses implementasi atau penerapan aplikasi Minaesa Rancak Bana kepada seluruh pegawai di BKHIT Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Nomor B-3839/TI.01.01/JJ.4/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Implementasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana. (terlampir).

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Manfaat dari aksi perubahan yang akan didapat jika penerapan aplikasi Minaesa Rancak Bana diaplikasikan di BKHIT Sumatera Barat, yaitu :

Tabel 3.1 Tabel Keuntungan Penerapan Aplikasi Minaesa Rancak Bana

Aspek	Sebelum	Sesudah
Pemakaian ATK (Kertas)	Rata-rata kebutuhan kertas untuk dokumen kelengkapan SPJ perjalanan dinas dalam satu daftar nominatif membutuhkan sekitar 19-25 lembar kertas (jika diambil rata-rata menjadi 22 lembar kertas). Kebutuhan kertas dalam 12 bulan untuk kelengkapan SPJ Perjalanan Dinas 22 lembar x 600 surat tugas per tahun = 13.200 lembar, dengan asumsi kesalahan pencetakan 20% sehingga total kebutuhan kertas 13.464 lembar dibagi 500 lembar/rim = 26,9 rim, dibulatkan menjadi 27 rim. Bila harga kertas 1 rim seharga Rp. 60.000, maka kebutubuhan belanja kertas untuk SPJ Kelengkapan Perjalanan	Dengan penerapan aplikasi Minaesa Rancak Bana, dokumen yang harus dicetak menjadi sekitar 5-9 lembar kertas (jika diambil rata-rata sekitar 7 lembar kertas). Sehingga dapat menghemat sekitar 15 lembar kertas (22 lembar – 7 lembar) per satu surat tugas. Dalam 1 bulan rata-rata terdapat 50 surat tugas di BKHIT Sumatera Barat. Sehingga kebutuhan kertas 7 x 600 surat tugas pertahun = 4200 lembar x 20% kesalahan cetak, total kebutuhan kertas pertahun adalah 5040 lembar pertahun dibagi 500 lembar per Rim = 10 rim x Rp. 60.000,- total biaya kertas SPJ perjalan dinas setahun adalah Rp. 600.000. efisiensi penghematan biaya

	Dinas sebanyak Rp. 1.620.000	kertas SPJ perjalan dinas adalah 62,96 %
Efisiensi transportasi	Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas harus datang langsung ke kantor UPT untuk mengambil SPT dan SPPD, sedangkan jarak antara kantor UPT dengan satpel BIM (salah satu satpel) adalah ± 27 km	Dengan aplikasi Minaesa Rancak Bana pegawai tidak perlu mengambil dokumen SPT dan SPPD ke kantor UPT, cukup mengunduh dan cetak mandiri melalui akun masing-masing dari manapun.
Tertib Administrasi	Hal yang biasa menjadi kendala administrasi bagian keuangan salah satunya di daftar nominatif, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas dan pengeluaran riil. Sehingga dapat menghambat proses pengajuan ke KPPN. Karena untuk pegawai di satpel BIM belum langsung di cetak.	Dengan sistem aplikasi Minaesa Rancak Bana, daftar nominatif, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas dan pengeluaran riil dapat langsung dicetak oleh pegawai. Sehingga saat penyerahan arsip asli kelengkapan keuangan sudah lengkap dengan tandatangan.

Selain mendapat keuntungan dari penerapan aplikasi Minaesa Rancak Bana, juga terdapat beberapa manfaat bagi *stakeholders* BKHIT Sumatera Barat, yaitu :

Tabel 3.2 Manfaat Aplikasi Minaesa Rancak Bana bagi Stakeholders

Stakeholders	Manfaat
Manajemen	• Dapat memonitoring kegiatan dari setiap pegawai • Dapat memonitoring anggaran belanja UPT
Pegawai	• Memudahkan pelaporan pertanggung jawaban perjalanan dinas • Mendapatkan kepastian rincian pertanggung jawaban • Dapat memantau proses pengajuan pertanggung jawaban

	• Dapat mengunduh dokumen surat tugas dan SPPD dimanapun, sehingga lebih efektif dan efisien proses perjalanan dinas.
Bagian Keuangan	• Memudahkan pengumpulan kelengkapan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas • Mempercepat waktu verifikasi dan pengajuan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas • Arsip keuangan perjalanan dinas lebih rapi dan terkumpul pada satu sistem
Pengelola Kegiatan	• Memudahkan monitoring dan pencatatan anggaran terhadap jumlah kegiatan yang telah dijalankan
Bagian Pelaporan	• Memudahkan pengumpulan data dan kelengkapan perjalanan dinas
Bendahara	• Cepat dan Mudah untuk mendapatkan data keuangan perjalanan dinas

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN, SERTA KETERKAITAN MATA PELATIHAN (MANFAAT) DENGAN AKSI PERUBAHAN

Pengembangan kompetensi difokuskan pada dua aspek untuk mendukung keberhasilan aplikasi Minaesa Rancak Bana.

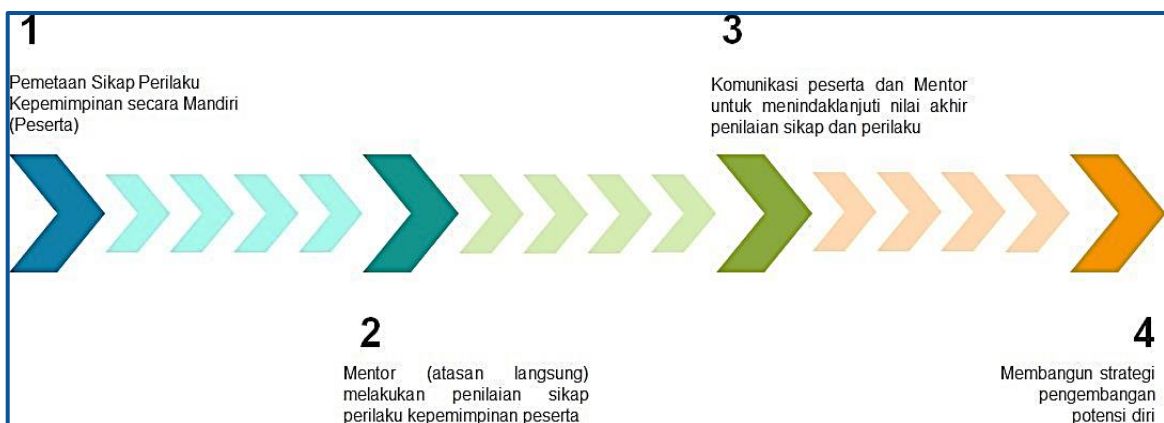
- **Kompetensi Teknis Operasional**

- Workshop “Merajut Ketaatan Administrasi Keuangan dengan MINAESA RANCAK BANA”: Pelatihan praktis penggunaan sistem untuk semua pegawai, dengan modul berbeda untuk pelaksana kegiatan, bendahara, dan verifikator.
- Pendampingan Lapangan (On-the-Job Training): Tim inti menjadi tutor sebaya untuk mendampingi rekan-rekannya yang masih kesulitan.

- **Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan**

- Coaching Clinic: Penulis sebagai pemimpin proyek akan mengadakan sesi klinis untuk mendengarkan kendala dan memberikan solusi langsung, sekaligus memotivasi tim.
- Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning): Seluruh tim belajar langsung dengan terlibat aktif dalam proses pengembangan dan implementasi sistem.

Pemetaan (assessment) sikap perilaku kepemimpinan dan potensi diri berdasarkan tahapan dan alur kegiatan pemetaan sikap perilaku pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Potensi Diri

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta : RM. Ende Dezeanto, S.St.Pi			Nama Mentor : N. Prayatno Ginting, S.P., M.M.		
NIP : 197812282002121003			NIP: : 197007021998031003		
Jabatan : Kepala			Jabatan : Kepala		
Instansi : Balai Karantina Indonesia Sumatera Barat			Instansi : Balai Besar Karantina Indonesia Sumatera Utara		
Program : 0					
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	7,71	8,80	7,33	7,95	Baik
Mentor	7,71	8,80	7,50	8,00	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	7,71	8,80	7,45	7,99	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.99-10	Istimewa		7,99		
7-8.99	Baik		Kualifikasi: Baik		
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 3.4 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR									
Nama	:	RM. Ende Dezeanto, S.St.Pi	Nama Mentor	:	N. Prayatno Ginting, S.P., M.M.				
NIP	:	197812282002121003	NIP:	:	197007021998031003				
Jabatan	:	Kepala	Jabatan	:	Kepala				
Instansi	:	Balai Karantina Indonesia Sumatera Barat	Instansi	:	Balai Besar Karantina Indonesia Sumatera Utara				
Program	:	0							
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi				
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa				
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa				
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa				
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa				
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa				
	Pengambilan Keputusan Dilema	9	9	9,00	Istimewa				
	Rata-Rata	7,71	7,71	7,71	Baik				
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa				
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00	Istimewa				
	Komunikasi	9	9	9,00	Istimewa				
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik				
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa				
	Rata-Rata	8,80	8,80	8,80	Baik				
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	9	9,00	Istimewa				
	Adaptabilitas	8	9	8,70	Baik				
	Pengembangan diri & org lain	9	9	9,00	Istimewa				
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa				
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa				
	Rata-Rata	7,33	7,50	7,45	Baik				
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,95	8,00	7,99	Baik				
Keterangan Kualifikasi									
9.99-10	Istimewa								
7-8.99	Baik								
5-6.99	Cukup								
3-4.99	Kurang								
1-2.99	Sangat Kurang								

Gambar 3.5 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

Matrik Strategi Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan Tata Kelola Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
Tim Teknis Keuangan	- Pemahaman regulasi keuangan dan akuntansi pemerintah -Penyusunan telaan dan kajian prosedur internal pengajuan SPJ - Penyusunan SOP pengajuan SPJ keuangan - pengumpulan database keuangan	- Pelatihan regulasi terbaru - Coaching/mentoring dalam penyusunan laporan digital
Tim Administrasi & Dokumentasi	- penyusunan jadwal agenda kegiatan -pembuatan dokumen kelengkapan RAP -pengelolaan arsip RAP	- Workshop manajemen arsip - Coaching standarisasi dokumen RAP
Tim IT	- Penguasaan aplikasi sistem keuangan digital - Keamanan data & integrasi sistem	- Pelatihan software keuangan - Mentoring keamanan siber & praktik pengelolaan database
Tim Desain & Strategi Komunikasi	- Desain infografis laporan RAP - menyusun Strategi komunikasi publik dalam RAP	- Pelatihan desain grafis & visualisasi data - Workshop komunikasi publik & media sosial

Tabel 3.4 Identifikasi/Daftar Risiko

Tahapan Kegiatan	Output Kunci	Identifikasi Risiko	Penyebab	Jenis Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Lanjut Penanganan (RTP)
Konsultasi & Koordinasi	Konsep Sistem Informasi	Konsultasi tidak berjalan	Minim komunikasi	Eksternal	Tinggi	Melakukan komunikasi intensif, melibatkan pihak terkait sejak awal, membuat notulen & penjadwalan
Pembentukan Tim	Draf SK Tim Kerja	Tim tidak solid, kurang kompeten	Pemilihan personel tidak tepat, tidak ada pembagian tugas jelas	Internal	Sedang	Seleksi anggota sesuai kompetensi, buat TOR & job description jelas, lakukan pembinaan
Penyusunan SOP	SOP	SOP tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan	Tidak melibatkan ahli, analisis proses tidak lengkap	Internal	Tinggi	Melibatkan tim teknis & pengguna, uji coba draft SOP, revisi sebelum finalisasi
Pembangunan Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi tidak selesai, tidak sesuai kebutuhan	Analisis kebutuhan dan rancangan kurang lengkap, keterbatasan SDM/anggaran IT	Internal	Sangat Tinggi	Lakukan penjadwalan meeting dg tim IT, membuat tahapan pengembangan sesuai skala prioritas
Uji Coba	Laporan	Uji coba tidak maksimal	Masih ada bug atau fitur yang belum terlengkapi	Internal	Tinggi	Lakukan pilot project, gunakan data real, dokumentasikan masalah untuk perbaikan
Sosialisasi	Notulen	Peserta tidak memahami penggunaan aplikasi	Materi sosialisasi tidak sesuai dan tidak tersampaikan ke seluruh pegawai	Internal	Sedang	Buat panduan pengguna, lakukan pelatihan praktik langsung, monitoring feedback, mendorong pemahaman RAP sebagai kepentingan bersama
Evaluasi	Laporan	Evaluasi tidak objektif atau tidak tuntas	Laporan evaluasi tidak komprehensif	Internal	Sedang	Tetapkan indikator kinerja, libatkan evaluator eksternal, buat rekomendasi tindak lanjut

Sedangkan dari implementasi aplikasi Minaesa Rancak Bana dapat diidentifikasi beberapa risiko yang muncul, yaitu :

Tabel 3.5 Manajemen Risiko Implementasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana

Proses/Kegiatan	Risiko	Mitigasi Risiko
Pegawai	Risiko pegawai belum paham	Membentuk agen perubahan yang dapat mendampingi pegawai
Jaringan Internet	Risiko jaringan internet error	Jika jaringan internet error atau putus, maka proses pertanggung jawaban dilakukan secara manual (tidak melalui aplikasi Minaesa Rancak Bana)
Gangguan pihak lain	Risiko keamanan aplikasi dari gangguan pihak lain / hacker	Selalu membuat <i>back up</i> data base, jika sewaktu-waktu aplikasi mendapat gangguan dari pihak lain / hacker

BAB IV

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. DISEMINASI/PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Mendorong terlaksananya Implementasi Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana, dilakukan beberapa metode publikasi sesuai dengan kebutuhan pada stakeholder terkait

Tabel 4.1 Sarana Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

No	Media Publikasi	Sasaran/Audien	Target
1.	Sosialisasi dan Demo Aplikasi	Seluruh Pegawai	Penyebarluasan informasi tentang dasar, latar belakang, rangkaian gab permasalahan, dan solusi tata kelola keuangan melalui aplikasi Minaesa Rancak Bana, sekaligus pembelajaran penggunaan aplikasi Minaesa Rancak Bana.
2	Pemasangan Banner dilingkungan Kantor	Seluruh Pegawai/Tamu BKHIT Sumatera Barat	Mengenalkan dan mengingatkan Pentingnya Penerapan Sistem Aplikasi Minaesa Rancak Bana dilingkungan BKHIT Sumatera Barat
3	Penyampaian Video dan Link Aplikasi Di grub media sosial Kantor	Seluruh Pegawai	Sarana Panduan dan memudahkan akses Aplikasi oleh Pegawai.
4	Apel Kantor	Peserta Apel/Seluruh Pegawai BKHIT Sumatera Barat	Penekanan Komitmen Pimpinan tentang Akuntabilitas dan Transparansi tata kelola keuangan khususnya perjalan dinas melalui penerapan Aplikasi Minaesa Rancak Bana,

5	Bimtek Agen Perubahan	Tim Agen Perubahan	Peningkatan kompetensi dan pemahaman Aplikasi Minaesa Rancak Bana, sehingga pegawai yang telah ditunjuk agen perubahan akan dapat membantu dan mengawal implementasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana. Dengan membantu pegawai disekitarnya yang mengalamikendalai pengisian atau input data dalam Aplikasi Minaesa Rancak Bana.
6	Konsultasi, Koordinasi dan Diskusi Intensif	• Kepala Badan Karantina Indonesia. • Kepala Balai Besar Sumatera Utara (Mentor) • Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin • Inspektorat Barantin	Menyampaikan gagasan, Meminta dukungan dan arahan tentang Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana.

B. KEBERHASILAN MENDAPATKAN DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

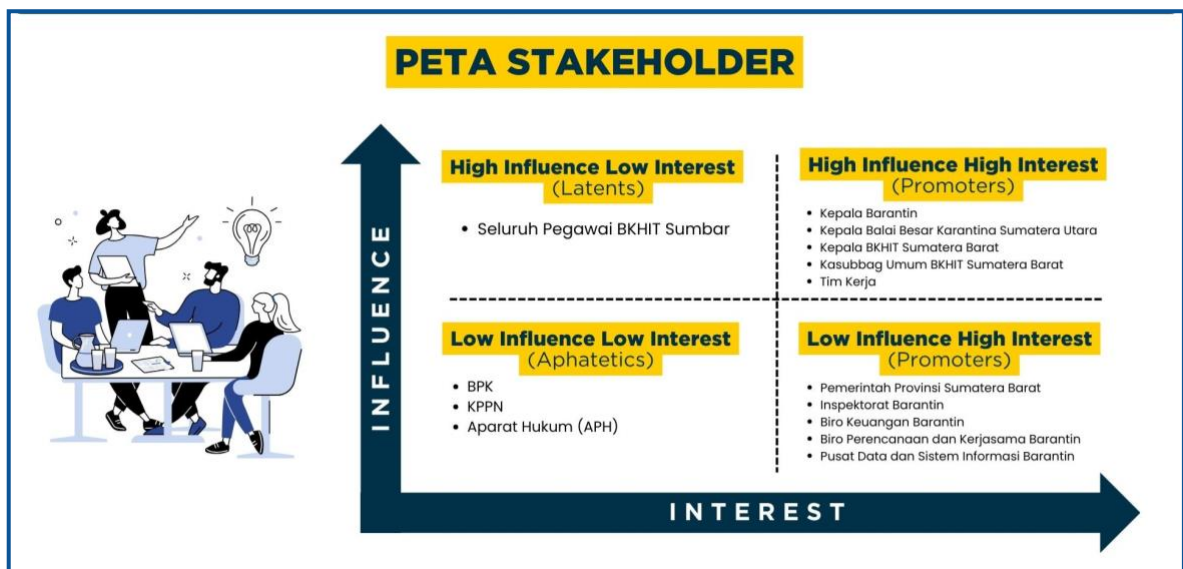
Selama proses penyusunan Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana dan penerpan Aplikasi di Lapangan Team Leader berkonsultasi, koordinasi dan melakukan publikasi Pemaparan Aplikasi Minaesa Rancak Bana banyak mendapatkan Dukungan dan Apresiasi dari para Stakeholder diantaranya

Tabel 4.2 Dukungan dari Stakeholders

No	Dukungan	Testimoni
1	Sahat Manaor Panggabean, Kepala Badan Karantina Indonesia	Memberikan Apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi yang luar biasa dalam mengembangkan aplikasi ‘Minaesa Rancak Bana’, inovasi ini merupakan terobosan strategis sejalan dengan visi “Trasnformasi Layanan Digital “Badan Karantina Indonesia. Aplikasi ini mencerminkan semangat transformasi anggaran yang Cerdas, Akuntabel, Transparan dan juga bukti nyata komitmen dalam mewujudkan tata kelola Karantina yang Modern, Efisien dan Akuntabel.
2	Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat	Memberikan apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi dalam mengembangkan aplikasi Minaesa Rancak Bana
3	Gusnar Ismail Gubernur Gorontalo	Mendukung Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana yang disusun Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, RM Ende Dezeanto
4	Idah Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubenmur Gorontalo	Menyatakan dukungan kepada bpk. RM Ende Dezeanto Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat atas Aksi Perubahan Minaesa Rancak Bana
5	Ichwandi, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin	Memberikan dukungan penuh terhadap aplikasi Minaesa Rancak Bana dan dapat menjadi <i>benchmark</i> bagi UPT di seluruh Indonesia.
6	N. Prayatno Ginting, Kepala BBKHIT Sumatera Utara (Mentor)	Memberikan dukungan sepenuhnya dan apresiasi terhadap Aksi Perubahan yang disusun untuk kemajuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
7	Muhammad Halim Kepala Subbagian Umum BKHIT Sumatera Barat	Dengan Aplikasi Minaesa Rancak Bana memudahkan bagian umum khususnya pengelola keuangan untuk verifikasi, pengumpulan kelengkapan dokumen perjalanan dinas dan dapat memonitor

		kegiatan perjalanan dinas kapan saja dan dimana saja.
8	Rendra Syafputra, Pegawai BKHIT Sumatera Barat	Dengan adanya aplikasi Minaesa Rancak Bana memudahkan kita sebagai pegawai untuk menyusun laporan keuangan pertanggung jawaban perjalanan dinas dan dapat memantau proses SPJ keuangan “Minaesa Rancak Bana”

Prinsip dasar Sistem harus berlandaskan Partisipasi dimana setiap pegawai wajib melaksanakan tahapan prosedur keuangan sesuai dengan peran masing-masing, serta stakeholder terkait



Gambar 4.1 Peta Stakeholder

Stakeholder internal yaitu:

- Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai pemegang kebijakan terkait ketertelusuran
- Inspektorat Badan Karantina Indonesia memberikan support terhadap perencanaan dan Pengawasan
- Kepala Biro Keuangan Badan Karantina Indonesia sebagai pembahas Prosedur Tata Kelola Keuangan.
- Seluruh Pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

Adapun untuk *Stakeholder eksternal* terdiri dari:

- Badan Pemeriksa Keuangan
- KPPN
- APH

BAB V

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

A. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan faktor penting agar inovasi tidak berhenti pada tahap implementasi jangka pendek, tetapi terus berkembang menjadi bagian dari sistem kerja organisasi. Dalam konteks ini, Aplikasi Minaesa Rancak Bana bukan sekadar Inovasi teknologi tetapi komitmen tatakelola akuntabilitas dan transparansi keuangan, untuk itu keberlanjutan sistem ini perlu konsistensi dalam pelaksanaan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Serta pengembangan dan perbaikan sesuai rencana target jangka menengah dan jangka panjang.

1. Keberlanjutan dalam Aspek Administrasi

Aplikasi harus menjadi prosedur yang ditaati dan terus dilaksanakan dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas di BKHIT Sumatera Barat yang saat ini telah dimulai.

2. Keberlanjutan dalam Aspek Pengembangan Menu Aplikasi

a. Modul RKA Usulan Rencana Kerja dan Anggaran

- Penambahan modul menu usulan RKA dari masing-masing bidang secara online.
- Menu keterangan jadwal revisi dan usulan revisi POK anggaran berjalan

b. Monitoring Serapan Anggaran dan Output Kinerja

- Penambahan menu pada monitoring yang telah ada dengan langsung menampilkan sisa anggaran dan kegiatan yang berjalan selaras dengan pengurangan data pada aplikasi keuangan eksternal SAKTI.
- Menu rencana kegiatan perbulan dalam satu tahun berdasarkan POK berjalan, dan perubahan menyesuaikan revisi POK tahun berjalan.

Mendorong aplikasi Minaesa Rancak Bana dapat diadopsi dan dikembangkan di tingkat Badan Karantina Indonesia untuk dapat dilakukan autentikasi tanda

tangan dan sistem jaringan server Barantin, sehingga dapat diterapkan pada seluruh UPT lingkup Badan Karantina Indonesia.

B. TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN JANGKA MENENGAH (6 BULAN)

Dalam Mewujudkan target jangka Menengah dan Jangka Panjang disusun rencana kegiatan dan target penyelesaian pekerjaan

MILESTONE JANGKA MENENGAH			
TAHAP	WAKTU	MILESTONE	KEGIATAN UTAMA
Tahap 4: Pengembangan Modul Perencanaan	Bulan 1-3 (Bln 5-7 total)	Modul RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) terintegrasi.	1. Analisis Kebutuhan: FGD dengan PPK dan Pejabat Penandatanganan untuk merancang alur perencanaan digital. 2. Pengembangan Fitur: Membuat form digital untuk pengusulan RKA oleh masing-masing PPK, dilengkapi dengan validasi otomatis terhadap pagu indikatif. 3. Integrasi Data: Menghubungkan modul RKA dengan database MAK dan referensi SBM terbaru. 4. Uji Coba & Pelatihan: Melatih PPK dan Kepala Balai dalam menggunakan modul perencanaan.

MILESTONE JANGKA MENENGAH			
TAHAP	WAKTU	MILESTONE	KEGIATAN UTAMA
Tahap 5: Pengembangan Modul Monitoring	Bulan 4-6 (Bln 8-10 total)	Dashboard Real-Time Serapan Anggaran dan Prediksi Kinerja Keuangan aktif.	1. Pengembangan Fitur: Membuat dashboard khusus untuk memantau realisasi anggaran vs RKA per program/kegiatan, termasuk visualisasi grafik dan warning untuk potensi under-spending. 2. Fitur Prediktif: Mengembangkan algoritma sederhana untuk memprediksi capaian serapan anggaran hingga akhir tahun. 3. Notifikasi Proaktif: Sistem mengirimkan alert otomatis kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jika realisasi kurang dari 50% di pertengahan tahun. 4. Integrasi dengan SPJ: Data dari modul SPJ otomatis memperbarui data realisasi pada dashboard.

Gambar 5.1 Milestone Jangka Menengah

BAB VI

PENUTUP

Aksi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Akuntabel Transparan yang diberi nama “MINAESA RANCAK BANA” (**M**onitoring **I**nformation of **N**ational quarantine **S**ingle dat**A**) (**t**Ranformasi **A**nggaran, **C**erdas, **A**Kunta**B**el dan **T**r**A**ns**p**Aran). merupakan platform digital yang dirancang sebagai Komitmen untuk mentransformasi tata kelola administrasi keuangan dari proses manual, rentan error, dan tersebar menjadi terdigitalisasi, terintegrasi, akuntabel, dan transparan.

Seluruh tahapan jangka pendek telah dilaksanakan secara lengkap, Komponen utama inovasi MINAESA RANCAK BANA diantaranya

- **Manajemen SPJ Digital:** Form digital terintegrasi dengan checklist otomatis untuk memastikan kelengkapan dokumen (kwitansi, tiket, laporan) sebelum disubmit, dilengkapi notifikasi pengingat batas waktu.
- **E-Arsip Keuangan Otomatis:** Penyimpanan arsip dokumen keuangan secara terpusat berbasis cloud, yang tersimpan otomatis saat proses upload, untuk mencegah dokumen tercecer atau hilang.
- **Digital Workflow Pembayaran:** Sistem alur kerja (workflow) otomatis yang memandu proses dari pengajuan, verifikasi, hingga approval, termasuk validasi otomatis untuk kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan).
- **Dashboard Monitoring & Audit Trail:** Dashboard real-time untuk memantau status SPJ dan pembayaran, serta fitur audit trail yang mencatat semua aktivitas pengguna (siapa, kapan, melakukan apa) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- **Pelaporan Terintegrasi:** Fitur untuk generate laporan keuangan secara otomatis dan integrasi dengan drive pelaporan untuk memudahkan pemeriksaan.

Aksi perubahan ini memberikan hasil perbaikan kinerja keuangan yang akuntabel dan transparan khususnya dalam tata kelola keuangan perjalanan dinas.

Aplikasi Minaesa Rancak Bana memudahkan tertib administrasi Keuangan khususnya dalam proses penyusunan kelengkapan administrasi perjalanan dinas, penyimpanan arsip kelengkapan dokumen keuangan perjalanan dinas serta Monitoring Kegiatan Perjalanan dinas.

KESIMPULAN

1. Aksi perubahan berhasil mencapai seluruh target jangka pendek, termasuk Penyusunan Prosedur Perjalanan Dinas dan penyusunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana
2. Peningkatan kompetensi pegawai dan tim efektif tercapai sepenuhnya, meliputi strategi komunikasi, pengelolaan dokumen, penyusunan regulasi internal, koordinasi Stakeholder, serta implementasi Sistem Aplikasi Minaesa Rancak Bana.
3. “Minaesa Rancak Bana” telah menjadi suatu sistem dalam pelaksanaan pertanggung jawaban laporan keuangan perjalanan dinas tingkat instansi di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
4. Dampak terukur mulai terlihat, termasuk Pengurangan jumlah kertas (ATK), Waktu pertanggung jawaban laporan keuangan perjalanan dinas, efisiensi pelaporan perjalanan dinas, tertib administrasi keuangan perjalanan dinas.
5. Sistem Aplikasi ini berpotensi untuk diadopsi dan didorong menjadi aplikasi di Badan Karantina Indonesia untuk dapat diaplikasikan pada seluruh UPT lingkup Badan Karantina Indonesia

SARAN DAN MASUKAN

1. Penguatan Sistem Digital Aplikasi Minaesa Rancak Bana

Diperlukan pengembangan aplikasi oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan Inspektorat Badan Karantina Indonesia khususnya penggunaan autentikasi tanda tangan sehingga basis data tunggal sehingga seluruh dokumen keuangan dapat diakui sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan yang legal, hal ini akan meningkatkan kecepatan dan peningkatan layanan digital/ full paperless, Serta penambahan menu Aplikasi.

2. Penguatan Prosedur tingkat Badan Karantina Indonesia

Kedepan Perlu Integrasi Prosedur yang telah diterbitkan Pusat melalui Inspektorat dengan sistem Aplikasi secara formal, saat ini prosedur dalam aplikasi Minaes Rancamaya telah mengikuti SOP yang diterbitkan Inspektorat namun bila aplikasi ini menjadi sistem di Badan karantina tentu dibutuhkan legalitas dalam tingkat Pusat.

3. Mendorong Dukungan dan Peningkatan Kapasitas Daya Simpan Server

Penggunaan Aplikasi pada jangka panjang dan apabila didorong menjadi aplikasi nasional lingkup Badan karantina tentu membutuhkan dukungan dan investasi jaringan dan kapasitas server yang lebih besar dan lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200. Jakarta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123. Jakarta.
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2021). **Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2024**. Jakarta: Kementerian PANRB.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Jakarta.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
11. LAN dan Kementerian PANRB. (2020). *Nilai-Nilai Fundamental ASN: BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)*. Jakarta.

12. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2017). *Exploring Strategy: Text and Cases* (11th ed.). Harlow: Pearson Education Limited. (Untuk konsep analisis PESTEL).
13. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (14th ed.). Boston: Pearson. (Untuk konsep analisis Gap dan manajemen perubahan).

Profil



RM Ende Dezeanto, S.St.Pi

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Desember 1978
 Pendidikan : Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d
 Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat

Riwayat Pekerjaan

Periode	Pekerjaan	Lokasi
2025 - Sekarang	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat	Padang
2024 - 2025	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Gorontalo	Gorontalo
2024 - 2024	Kepala Subbagian Protokol Badan Karantina Indonesia	Jakarta
2013 - 2024	Staf Fungsional Karantina Ikan, Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM)	Jakarta
2007 - 2013	Staf di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Priok	Jakarta
2001 - 2007	Staf di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima	Nusa Tenggara Barat

Riwayat Pendidikan

Periode	Pendidikan	Jenjang
1997 - 2001	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	Perkuliahan
1994-1997	SMA Negeri 47 Jakarta	SMA
1991-1994	Bangladesh International Tutorial	Junior High School
1985-1991	Bangladesh International Tutorial	Elementary School

Lampiran Penyampaian Penetapan Mentor
Pelatihan Kepemimpinan Administrator PKA)
Angkatan X Tahun 2025
Nomor : 9155/SM.04.02/I.1/8/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

**FORM DATA MENTOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN X
TAHUN 2025**

Nama Peserta : RM Ende Dezeanto, S.St.P.i
Nomor Daftar : 31
Hadir Instansi : BKHIT Sumatera Barat
Jabatan : Kepala BKHIT Sumatera Barat

Nama Mentor : N. Prayatno Ginting
N I P : 197007021998031003
No. NPWP : 488834623331000
NIK Mentor : 1571070207700021
Instansi : BBKHIT Sumatera Utara
Jabatan : Kepala BBKHIT Sumatera Utara
No. Handphone : 08127404057

Disetujui Oleh :
Mentor,



N. Prayatno Ginting
NIP. 197007021998031003

TABEL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Tanggal	Agenda	Output
1.	Konsultasi dengan Coach dan Mentor	6 Oktober 2025	Membahas RAP dan Meminta Persetujuan	Persetujuan RAP
2.	Rapat Pertama Tim Kerja	10 Oktober 2025	Pembentukan Tim Kerja dan Pembagian Tugas Kerja	SK Tim Kerja dan Pembagian Tugas
3.	Rapat Lanjutan Tim Kerja	13 Oktober 2025	Penyusunan SOP dan Rancangan Aplikasi	SOP
4.	Rapat Lanjutan Tim Kerja	27 Oktober 2025	Pengumpulan Database dan Penyusunan Form Pembangunan Aplikasi	Database dan Form Pembangunan Aplikasi
5.	Rapat Tim Kerja	8 November 2025	Pembangunan Sistem Informasi	Kerangka Aplikasi
6.	Rapat Tim Kerja	17 November 2025	Uji Coba Internal Aplikasi	Perbaikan dan Fitur Tambahan dari Aplikasi
7.	Sosialisasi	24 November 2025	Penyampaian Aksi Perubahan Kepada Seluruh Pegawai	Laporan Sosialisasi dan Tersampainya Agenda Kepada Seluruh Pegawai
8.	Rapat Evaluasi dan Persiapan Implementasi	1 Desember 2025	Evaluasi Terakhir Terhadap Kesiapan Implementasi	Surat Pelaporan dan Pelaksanaan Implementasi

LAMPIRAN FOTO



Konsultasi dengan Coach



Pertemuan dengan Mentor



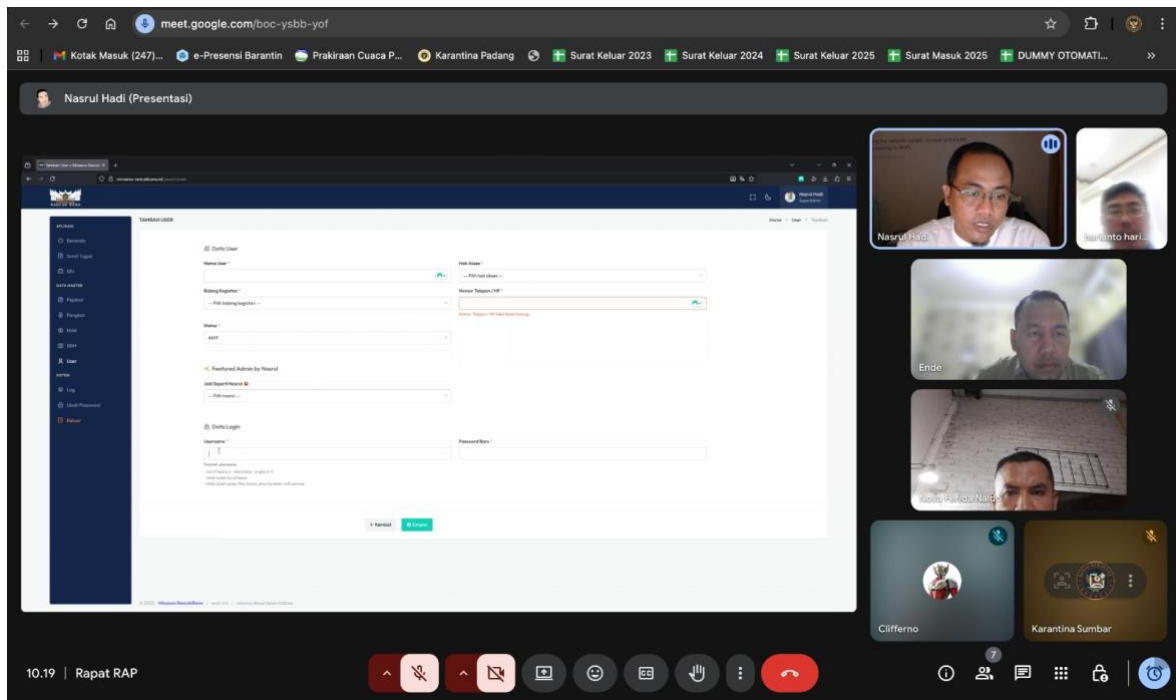
Rapat Pembentukan Tim Efektif



Rapat Penyusunan SOP



Rapat Online Pembuatan Aplikasi dengan Pengembang



Uji Coba Aplikasi



Sosialisasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana



Implementasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana



Pemasangan Banner Aplikasi Minaesa Rancak Bana



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Nomor : B-3065/TU.01.02/JJ.4/10/2025

10 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana

di

Tempat

Sehubungan dengan telah terbentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Senin / 13 Oktober 2025

waktu : pukul 09.00 WIB s/d Selesai

tempat : Ruang Kepala BKHIT Sumatera Barat

Jl. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air – Padang

agenda : Rapat Tim Efektif Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



RM Ende Dezeanto

NOTULENSI

Hari / tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Waktu : 09.00 WIB s/d 11.15 WIB

Tempat : Ruang Kepala BKHIT Sumatera Barat

Agenda : Rapat Tim Efektif Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan

1. Agenda Rapat

Rapat dilaksanakan dengan maksud **"Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan"**

2. Jalannya Rapat

a. Pembukaan

- Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, dimulai pada pukul 09.10 WIB. Rapat dibuka oleh Bapak RM Ende Dezeanto dan dihadiri oleh Tim Penyusun (Daftar hadir terlampir)
- Pimpinan rapat menjelaskan tujuan rapat, yaitu menyusun rancangan aksi perubahan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan inovasi/kegiatan.

b. Pembahasan

- Penjelasan mengenai latar belakang Rancangan Aksi mengenai permasalahan atau tantangan yang melatarbelakangi perlunya aksi perubahan.
- Diskusi dan penyusunan rancangan aksi perubahan yang dipimpin oleh Bapak RM Ende Dezeanto dan Tim. Beberapa poin yang di bahas :
 - Masukan dari tim terkait beberapa masalah yang akan diangkat menjadi rancangan aksi perubahan. Dari beberapa masalah yang dibahas, tim memutuskan untuk memilih masalah efektifitas dan transparansi sistem informasi keuangan.
 - Tujuan rancangan aksi mengenai sistem informasi keuangan ini adalah untuk mengefektifkan beberapa kegiatan, yaitu : surat dinas, laporan kegiatan dan laporan keuangan.

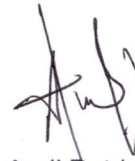
3. Penutup

- Rapat ditutup pada pukul 11.15 oleh pimpinan rapat, dengan harapan seluruh peserta dapat berperan aktif dalam penyempurnaan dan pelaksanaan aksi perubahan.

Pimpinan Rapat,

drh. Harianto
NIP. 198203112008011008

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andi Patria', written over a faint horizontal line.

Andi Patria
NIP. 198607122020121001

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
1	Provinsi NAD Aceh	1. Kabupaten Aceh Barat	Rp360000	Rp140000	Rp100000	Rp1.578.000	Rp770.000
		2. Kabupaten Aceh Barat Daya					
		3. Kabupaten Aceh Besar					
		4. Kabupaten Aceh Jaya					
		5. Kabupaten Aceh Selatan					
		6. Kabupaten Aceh Singkil					
		7. Kabupaten Aceh Tamiang					
		8. Kabupaten Aceh Tengah					
		9. Kabupaten Aceh Tenggara					
		10. Kabupaten Aceh Timur					
		11. Kabupaten Aceh Utara					
		12. Kabupaten Bener Meriah					
		13. Kabupaten Bireuen					
		14. Kabupaten Gayo Lues					
		15. Kabupaten Nagan Raya					
		16. Kabupaten Pidie					
		17. Kabupaten Pidie Jaya					
		18. Kabupaten Simeulue					
		19. Kota Banda Aceh					
		20. Kota Langsa					
		21. Kota Lhokseumawe					
		22. Kota Sabang					
		23. Kota Subulussalam					
2	Sumatera Utara	1. Kabupaten Asahan	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.188.000	Rp699.000
		2. Kabupaten Batubara					
		3. Kabupaten Dairi					
		4. Kabupaten Deli Serdang					
		5. Kabupaten Humbang Hasundutan					
		6. Kabupaten Karo					
		7. Kabupaten Labuhanbatu					
		8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan					
		9. Kabupaten Labuhanbatu Utara					
		10. Kabupaten Langkat					
		11. Kabupaten Mandailing Natal					
		12. Kabupaten Nias					
		13. Kabupaten Nias Barat					
		14. Kabupaten Nias Selatan					
		15. Kabupaten Nias Utara					
		16. Kabupaten Padang Lawas					
		17. Kabupaten Padang Lawas Utara					
		18. Kabupaten Pakpak Bharat					
		19. Kabupaten Samosir					
		20. Kabupaten Serdang Bedagai					
		21. Kabupaten Simalungun					
		22. Kabupaten Tapanuli Selatan					
		23. Kabupaten Tapanuli Tengah					
		24. Kabupaten Tapanuli Utara					
		25. Kabupaten Toba Samosir					
		26. Kota Binjai					
		27. Kota Gunungsitoli					
		28. Kota Medan					
		29. Kota Padangsidempuan					
		30. Kota Pematangsiantar					
		31. Kota Sibolga					
		32. Kota Tanjungbalai					
		33. Kota Tebing Tinggi					
3	Sumatera Barat	1. Kabupaten Agam	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.353.000	Rp701.000
		2. Kabupaten Dharmasraya					
		3. Kabupaten Kepulauan Mentawai					
		4. Kabupaten Lima Puluh Kota					
		5. Kabupaten Padang Pariaman					
		6. Kabupaten Pasaman					
		7. Kabupaten Pasaman Barat					
		8. Kabupaten Pesisir Selatan					
		9. Kabupaten Sijunjung					
		10. Kabupaten Solok					
		11. Kabupaten Solok Selatan					
		12. Kabupaten Tanah Datar					
		13. Kota Bukittinggi					
		14. Kota Padang					
		15. Kota Padangpanjang					
		16. Kota Pariaman					
		17. Kota Payakumbuh					
		18. Kota Sawahlunto					
		19. Kota Solok					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
4	Sumatera Selatan	1. Kabupaten Banyuasin	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.966.000	Rp861.000
		2. Kabupaten Empat Lawang					
		3. Kabupaten Lahat					
		4. Kabupaten Muara Enim					
		5. Kabupaten Musi Banyuasin					
		6. Kabupaten Musi Rawas					
		7. Kabupaten Musi Rawas Utara					
		8. Kabupaten Ogan Ilir					
		9. Kabupaten Ogan Komering Ilir					
		10. Kabupaten Ogan Komering Ulu					
		11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan					
		12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur					
		13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir					
		14. Kota Lubuklinggau					
		15. Kota Pagar Alam					
		16. Kota Palembang					
		17. Kota Prabumulih					
5	Riau	1. Kabupaten Bengkalis	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.650.000	Rp852.000
		2. Kabupaten Indragiri Hilir					
		3. Kabupaten Indragiri Hulu					
		4. Kabupaten Kampar					
		5. Kabupaten Kepulauan Meranti					
		6. Kabupaten Kuantan Singingi					
		7. Kabupaten Pelalawan					
		8. Kabupaten Rokan Hilir					
		9. Kabupaten Rokan Hulu					
		10. Kabupaten Siak					
		11. Kota Dumai					
		12. Kota Pekanbaru					
6	Kepulauan Riau	1. Kabupaten Bintan	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.388.000	Rp792.000
		2. Kabupaten Karimun					
		3. Kabupaten Kepulauan Anambas					
		4. Kabupaten Lingga					
		5. Kabupaten Natuna					
		6. Kota Batam					
		7. Kota Tanjung Pinang					
7	Jambi	1. Kabupaten Batanghari	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.252.000	Rp580.000
		2. Kabupaten Bungo					
		3. Kabupaten Kerinci					
		4. Kabupaten Merangin					
		5. Kabupaten Muaro Jambi					
		6. Kabupaten Sarolangun					
		7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat					
		8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
		9. Kabupaten Tebo					
		10. Kota Jambi					
		11. Kota Sungai Penuh					
8	Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Selatan	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.546.000	Rp692.000
		2. Kabupaten Bengkulu Tengah					
		3. Kabupaten Bengkulu Utara					
		4. Kabupaten Kaur					
		5. Kabupaten Kepahiang					
		6. Kabupaten Lebong					
		7. Kabupaten Mukomuko					
		8. Kabupaten Rejang Lebong					
		9. Kabupaten Seluma					
		10. Kota Bengkulu					
9	Bangka Belitung	1. Kabupaten Bangka	Rp410000	Rp160000	Rp120000	Rp1.957.000	Rp724.000
		2. Kabupaten Bangka Barat					
		3. Kabupaten Bangka Selatan					
		4. Kabupaten Bangka Tengah					
		5. Kabupaten Belitung					
		6. Kabupaten Belitung Timur					
		7. Kota Pangkal Pinang					
10	Lampung	1. Kabupaten Lampung Tengah	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.539.000	Rp621.000
		2. Kabupaten Lampung Utara					
		3. Kabupaten Lampung Selatan					
		4. Kabupaten Lampung Barat					
		5. Kabupaten Lampung Timur					
		6. Kabupaten Mesuji					
		7. Kabupaten Pesawaran					
		8. Kabupaten Pesisir Barat					
		9. Kabupaten Pringsewu					
		10. Kabupaten Tulang Bawang					
		11. Kabupaten Tulang Bawang Barat					
		12. Kabupaten Tanggamus					
		13. Kabupaten Way Kanan					
		14. Kota Bandar Lampung					
		15. Kota Metro					
11	Banten	1. Kabupaten Lebak	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.301.000	Rp775.000
		2. Kabupaten Pandeglang					
		3. Kabupaten Serang					
		4. Kabupaten Tangerang					
		5. Kota Cilegon					
		6. Kota Serang					
		7. Kota Tangerang					
		8. Kota Tangerang Selatan					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
12	Jawa Barat	1. Kabupaten Bandung	Rp430000	Rp170000	Rp120000	Rp1.366.000	Rp735.000
		2. Kabupaten Bandung Barat					
		3. Kabupaten Bekasi					
		4. Kabupaten Bogor					
		5. Kabupaten Ciamis					
		6. Kabupaten Cianjur					
		7. Kabupaten Cirebon					
		8. Kabupaten Garut					
		9. Kabupaten Indramayu					
		10. Kabupaten Karawang					
		11. Kabupaten Kuningan					
		12. Kabupaten Majalengka					
		13. Kabupaten Pangandaran					
		14. Kabupaten Purwakarta					
		15. Kabupaten Subang					
		16. Kabupaten Sukabumi					
		17. Kabupaten Sumedang					
		18. Kabupaten Tasikmalaya					
		19. Kota Bandung					
		20. Kota Banjar					
		21. Kota Bekasi					
		22. Kota Bogor					
		23. Kota Cimahi					
		24. Kota Cirebon					
		25. Kota Depok					
		26. Kota Sukabumi					
		27. Kota Tasikmalaya					
13	Jawa Tengah	1. Kabupaten Banjarnegara	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.286.000	Rp810.000
		2. Kabupaten Banyumas					
		3. Kabupaten Batang					
		4. Kabupaten Blora					
		5. Kabupaten Boyolali					
		6. Kabupaten Brebes					
		7. Kabupaten Cilacap					
		8. Kabupaten Demak					
		9. Kabupaten Grobogan					
		10. Kabupaten Jepara					
		11. Kabupaten Karanganyar					
		12. Kabupaten Kebumen					
		13. Kabupaten Kendal					
		14. Kabupaten Klaten					
		15. Kabupaten Kudus					
		16. Kabupaten Magelang					
		17. Kabupaten Pati					
		18. Kabupaten Pekalongan					
		19. Kabupaten Pemalang					
		20. Kabupaten Purbalingga					
		21. Kabupaten Purworejo					
		22. Kabupaten Rembang					
		23. Kabupaten Semarang					
		24. Kabupaten Sragen					
		25. Kabupaten Sukoharjo					
		26. Kabupaten Tegal					
		27. Kabupaten Temanggung					
		28. Kabupaten Wonogiri					
		29. Kabupaten Wonosobo					
		30. Kota Magelang					
		31. Kota Pekalongan					
		32. Kota Salatiga					
		33. Kota Semarang					
		34. Kota Surakarta					
		35. Kota Tegal					
		1. Kabupaten Bangkalan					
		2. Kabupaten Banyuwangi					
		3. Kabupaten Blitar					
		4. Kabupaten Bojonegoro					
		5. Kabupaten Bondowoso					
		6. Kabupaten Gresik					
		7. Kabupaten Jember					
		8. Kabupaten Jombang					
		9. Kabupaten Kediri					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
14	Jawa Timur	10. Kabupaten Lamongan	Rp410000	Rp160000	Rp120000	Rp1.234.000	Rp814.000
		11. Kabupaten Lumajang					
		12. Kabupaten Madiun					
		13. Kabupaten Magetan					
		14. Kabupaten Malang					
		15. Kabupaten Mojokerto					
		16. Kabupaten Nganjuk					
		17. Kabupaten Ngawi					
		18. Kabupaten Pacitan					
		19. Kabupaten Pamekasan					
		20. Kabupaten Pasuruan					
		21. Kabupaten Ponorogo					
		22. Kabupaten Probolinggo					
		23. Kabupaten Sampang					
		24. Kabupaten Sidoarjo					
		25. Kabupaten Situbondo					
		26. Kabupaten Sumenep					
		27. Kabupaten Trenggalek					
		28. Kabupaten Tuban					
		29. Kabupaten Tulungagung					
		30. Kota Batu					
		31. Kota Blitar					
		32. Kota Kediri					
		33. Kota Madiun					
		34. Kota Malang					
		35. Kota Mojokerto					
		36. Kota Pasuruan					
		37. Kota Probolinggo					
		38. Kota Surabaya					
15	DKI Jakarta	1. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp430000	Rp170000	Rp120000	Rp1.062.000	Rp730.000
		2. Kota Administrasi Jakarta Pusat					
		3. Kota Administrasi Jakarta Selatan					
		4. Kota Administrasi Jakarta Timur					
		5. Kota Administrasi Jakarta Utara					
		6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu					
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Kabupaten Bantul	Rp420000	Rp170000	Rp130000	Rp1.600.000	Rp845.000
		2. Kabupaten Gunungkidul					
		3. Kabupaten Kulon Progo					
		4. Kabupaten Sleman					
		5. Kota Yogyakarta					
17	Bali	1. Kabupaten Badung	Rp480000	Rp190000	Rp140000	Rp1.754.000	Rp1.138.000
		2. Kabupaten Bangli					
		3. Kabupaten Buleleng					
		4. Kabupaten Gianyar					
		5. Kabupaten Jembrana					
		6. Kabupaten Karangasem					
		7. Kabupaten Klungkung					
		8. Kabupaten Tabanan					
		9. Kota Denpasar					
18	Nusa Tenggara Barat	1. Kabupaten Bima	Rp440000	Rp180000	Rp130000	Rp1.418.000	Rp907.000
		2. Kabupaten Dompu					
		3. Kabupaten Lombok Barat					
		4. Kabupaten Lombok Tengah					
		5. Kabupaten Lombok Timur					
		6. Kabupaten Lombok Utara					
		7. Kabupaten Sumbawa					
		8. Kabupaten Sumbawa Barat					
		9. Kota Bima					
		10. Kota Mataram					
19	Nusa Tenggara Timur	1. Kabupaten Alor	Rp430000	Rp170000	Rp130000	Rp1.450.000	Rp737.000
		2. Kabupaten Belu					
		3. Kabupaten Ende					
		4. Kabupaten Flores Timur					
		5. Kabupaten Kupang					
		6. Kabupaten Lembata					
		7. Kabupaten Malaka					
		8. Kabupaten Manggarai					
		9. Kabupaten Manggarai Barat					
		10. Kabupaten Manggarai Timur					
		11. Kabupaten Ngada					
		12. Kabupaten Nagekeo					
		13. Kabupaten Rote Ndao					
		14. Kabupaten Sabu Raijua					
		15. Kabupaten Sikka					
		16. Kabupaten Sumba Barat					
		17. Kabupaten Sumba Barat Daya					
		18. Kabupaten Sumba Tengah					
		19. Kabupaten Sumba Timur					
		20. Kabupaten Timor Tengah Selatan					
		21. Kabupaten Timor Tengah Utara					
		22. Kota Kupang					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
20	Kalimantan Barat	1. Kabupaten Bengkayang	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.125.000	Rp576.000
		2. Kabupaten Kapuas Hulu					
		3. Kabupaten Kayong Utara					
		4. Kabupaten Ketapang					
		5. Kabupaten Kubu Raya					
		6. Kabupaten Landak					
		7. Kabupaten Melawi					
		8. Kabupaten Mempawah					
		9. Kabupaten Sambas					
		10. Kabupaten Sanggau					
		11. Kabupaten Sekadau					
		12. Kabupaten Sintang					
		13. Kota Pontianak					
		14. Kota Singkawang					
21	Kalimantan Selatan	1. Kabupaten Balangan	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.500.000	Rp746.000
		2. Kabupaten Banjar					
		3. Kabupaten Barito Kuala					
		4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan					
		5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah					
		6. Kabupaten Hulu Sungai Utara					
		7. Kabupaten Kotabaru					
		8. Kabupaten Tabalong					
		9. Kabupaten Tanah Bumbu					
		10. Kabupaten Tanah Laut					
		11. Kabupaten Tapin					
		12. Kota Banjarbaru					
		13. Kota Banjarmasin					
22	Kalimantan Tengah	1. Kabupaten Barito Selatan	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.189.000	Rp706.000
		2. Kabupaten Barito Timur					
		3. Kabupaten Barito Utara					
		4. Kabupaten Gunung Mas					
		5. Kabupaten Kapuas					
		6. Kabupaten Katingan					
		7. Kabupaten Kotawaringin Barat					
		8. Kabupaten Kotawaringin Timur					
		9. Kabupaten Lamandau					
		10. Kabupaten Murung Raya					
		11. Kabupaten Pulang Pisau					
		12. Kabupaten Sukamara					
		13. Kabupaten Seruyan					
		14. Kota Palangka Raya					
23	Kalimantan Timur	1. Kabupaten Berau	Rp430000	Rp170000	Rp130000	Rp1.507.000	Rp804.000
		2. Kabupaten Kutai Barat					
		3. Kabupaten Kutai Kartanegara					
		4. Kabupaten Kutai Timur					
		5. Kabupaten Mahakam Ulu					
		6. Kabupaten Paser					
		7. Kabupaten Penajam Paser Utara					
		8. Kota Balikpapan					
		9. Kota Bontang					
		10. Kota Samarinda					
24	Kalimantan Utara	1. Kabupaten Bulungan	Rp430000	Rp170000	Rp130000	Rp1.507.000	Rp904.000
		2. Kabupaten Malinau					
		3. Kabupaten Nunukan					
		4. Kabupaten Tana Tidung					
		5. Kota Tarakan					
25	Gorontalo	1. Kabupaten Boalemo	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.606.000	Rp955.000
		2. Kabupaten Bone Bolango					
		3. Kabupaten Gorontalo					
		4. Kabupaten Gorontalo Utara					
		5. Kabupaten Pohuwato					
		6. Kota Gorontalo					
26	Sulawesi Selatan	1. Kabupaten Bantaeng	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.423.000	Rp745.000
		2. Kabupaten Barru					
		3. Kabupaten Bone					
		4. Kabupaten Bulukumba					
		5. Kabupaten Enrekang					
		6. Kabupaten Gowa					
		7. Kabupaten Jeneponto					
		8. Kabupaten Kepulauan Selayar					
		9. Kabupaten Luwu					
		10. Kabupaten Luwu Timur					
		11. Kabupaten Luwu Utara					
		12. Kabupaten Maros					
		13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan					
		14. Kabupaten Pinrang					
		15. Kabupaten Sidenreng Rappang					
		16. Kabupaten Sinjai					
		17. Kabupaten Soppeng					
		18. Kabupaten Takalar					
		19. Kabupaten Tana Toraja					
		20. Kabupaten Toraja Utara					
		21. Kabupaten Wajo					
		22. Kota Makassar					
		23. Kota Palopo					
		24. Kota Parepare					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
27	Sulawesi Tenggara	1. Kabupaten Bombana	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.297.000	Rp786.000
		2. Kabupaten Buton					
		3. Kabupaten Buton Selatan					
		4. Kabupaten Buton Tengah					
		5. Kabupaten Buton Utara					
		6. Kabupaten Kolaka					
		7. Kabupaten Kolaka Timur					
		8. Kabupaten Kolaka Utara					
		9. Kabupaten Konawe					
		10. Kabupaten Konawe Kepulauan					
		11. Kabupaten Konawe Selatan					
		12. Kabupaten Konawe Utara					
		13. Kabupaten Muna					
		14. Kabupaten Muna Barat					
		15. Kabupaten Wakatobi					
		16. Kota Bau-Bau					
		17. Kota Kendari					
28	Sulawesi Tengah	1. Kabupaten Banggai	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.679.000	Rp951.000
		2. Kabupaten Banggai Kepulauan					
		3. Kabupaten Banggai Laut					
		4. Kabupaten Buol					
		5. Kabupaten Donggala					
		6. Kabupaten Morowali					
		7. Kabupaten Morowali Utara					
		8. Kabupaten Parigi Moutong					
		9. Kabupaten Poso					
		10. Kabupaten Sigi					
		11. Kabupaten Tojo Una-Una					
		12. Kabupaten Toli-Toli					
		13. Kota Palu					
29	Sulawesi Utara	1. Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp370000	Rp150000	Rp100000	Rp1.270.000	Rp978.000
		2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan					
		3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur					
		4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara					
		5. Kabupaten Kepulauan Sangihe					
		6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Bontol					
		7. Kabupaten Kepulauan Talaud					
		8. Kabupaten Minahasa					
		9. Kabupaten Minahasa Selatan					
		10. Kabupaten Minahasa Tenggara					
		11. Kabupaten Minahasa Utara					
		12. Kota Bitung					
		13. Kota Kotamobagu					
		14. Kota Manado					
		15. Kota Tomohon					
30	Sulawesi Barat	1. Kabupaten Majene	Rp410000	Rp160000	Rp120000	Rp1.344.000	Rp704.000
		2. Kabupaten Mamasa					
		3. Kabupaten Mamuju					
		4. Kabupaten Mamuju Tengah					
		5. Kabupaten Mamuju Utara					
		6. Kabupaten Polewali Mandar					
		7. Kota Mamuju					
31	Maluku	1. Kabupaten Buru	Rp380000	Rp150000	Rp100000	Rp1.059.000	Rp667.000
		2. Kabupaten Buru Selatan					
		3. Kabupaten Kepulauan Aru					
		4. Kabupaten Maluku Barat Daya					
		5. Kabupaten Maluku Tengah					
		6. Kabupaten Maluku Tenggara					
		7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat					
		8. Kabupaten Seram Bagian Barat					
		9. Kabupaten Seram Bagian Timur					
		10. Kota Ambon					
		11. Kota Tual					
32	Maluku Utara	1. Kabupaten Halmahera Barat	Rp390000	Rp160000	Rp120000	Rp1.160.000	Rp654.000
		2. Kabupaten Halmahera Tengah					
		3. Kabupaten Halmahera Utara					
		4. Kabupaten Halmahera Selatan					
		5. Kabupaten Kepulauan Sula					
		6. Kabupaten Halmahera Timur					
		7. Kabupaten Pulau Morotai					
		8. Kabupaten Pulau Taliabu					
		9. Kota Ternate					
		10. Kota Tidore Kepulauan					
		1. Kabupaten Asmat					
		2. Kabupaten Biak Numfor					
		3. Kabupaten Boven Digoel					
		4. Kabupaten Deiyai					
		5. Kabupaten Dogiyai					
		6. Kabupaten Intan Jaya					
		7. Kabupaten Jayapura					
		8. Kabupaten Jayawijaya					
		9. Kabupaten Keerom					
		10. Kabupaten Kepulauan Yapen					
		11. Kabupaten Lanny Jaya					
		12. Kabupaten Mamberamo Raya					
		13. Kabupaten Mamberamo Tengah					
		14. Kabupaten Mappi					

NO.	Provinsi	Kota/Kabupaten	SBM Uang Harian 2026			SBM Penginapan	
			Luar kota	Dalam Kota	Diklat	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Golongan I, II, III 2026
33	Papua	15. Kabupaten Merauke	Rp380000	Rp230000	Rp170000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
		16. Kabupaten Mimika					
		17. Kabupaten Nabire					
		18. Kabupaten Nduga					
		19. Kabupaten Paniai					
		20. Kabupaten Pegunungan Bintang					
		21. Kabupaten Puncak					
		22. Kabupaten Puncak Jaya					
		23. Kabupaten Sarmi					
		24. Kabupaten Supiori					
		25. Kabupaten Tolikara					
		26. Kabupaten Waropen					
		27. Kabupaten Yahukimo					
		28. Kabupaten Yalimo					
34	Papua Barat	29. Kota Jayapura	Rp480000	Rp190000	Rp140000	Rp2.056.000	Rp967.000
		1. Kabupaten Fakfak					
		2. Kabupaten Kaimana					
		3. Kabupaten Manokwari					
		4. Kabupaten Manokwari Selatan					
		5. Kabupaten Maybrat					
		6. Kabupaten Pegunungan Arfak					
		7. Kabupaten Raja Ampat					
		8. Kabupaten Sorong					
		9. Kabupaten Sorong Selatan					
		10. Kabupaten Tambora					
		11. Kabupaten Teluk Bintuni					
		12. Kabupaten Teluk Wondama					



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Nomor : B-3284/TU.01.02/JJ.4/10/2025

24 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana

di

Tempat

Sehubungan dengan telah terbentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Senin / 27 Oktober 2025

waktu : pukul 10.00 WIB s/d Selesai

tempat : Ruang Kepala BKHIT Sumatera Barat

Jl. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air – Padang

agenda : Rapat Tim Efektif Lanjutan Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



RM Ende Dezeanto

NOTULENSI

Hari / tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Waktu : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala BKHIT Sumatera Barat

Agenda : Rapat Tim Efektif Lanjutan Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan

1. Agenda Rapat

Rapat dilaksanakan dengan maksud "**Lanjutan Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan**"

2. Jalannya Rapat

a. Pembukaan

- Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 bertempat di Ruang Kepala BKHIT Sumatera Barat, dimulai pada pukul 09.05 WIB. Rapat dibuka oleh Bapak RM Ende Dezeanto dan dihadiri oleh Tim Penyusun (Daftar hadir terlampir)
- Pimpinan rapat menjelaskan tujuan rapat, yaitu lanjutan menyusun rancangan aksi perubahan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan inovasi/kegiatan.

b. Pembahasan

- Pemimpin rapat menjelaskan mengenai lanjutan rancangan aksi perubahan, berupa aplikasi sistem informasi keuangan.
- Tim mengumpulkan data base dan form laporan, khususnya dari laporan keuangan serta laporan perjalanan.
- Pemimpin rapat beserta tim membuat alur proses dari aplikasi rancangan aksi yang akan di buat.
- Pemimpin rapat meminta agar aplikasi yang akan dibuat harus dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

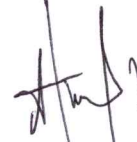
3. Penutup

- Rapat ditutup pada pukul 11.10 oleh pimpinan rapat, dengan harapan seluruh peserta dapat berperan aktif dalam penyempurnaan dan pelaksanaan aksi perubahan.

Pimpinan Rapat,

drh. Harianto
NIP. 198203112008011008

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andi Patria', written over a vertical line.

Andi Patria
NIP. 198607122020121001



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Nomor : B-3479/TU.01.02/JJ.4/11/2025

7 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana

di

Tempat

Sehubungan dengan telah terbentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Sabtu / 8 November 2025

waktu : pukul 10.00 WIB s/d Selesai

tempat : *Google Meet*

<https://meet.google.com/boc-ysbb-yof>

agenda : Rapat Tim Efektif Pembangunan Aplikasi Minaesa RancakBana

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



RM Ende Dezeanto

NOTULENSI

Hari / tanggal : Sabtu, 08 November 2025

Waktu : 10.00 WIB s/d 11.05 WIB

Tempat : Aplikasi *google meets*

Agenda : Rapat Tim Efektif Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana

1. Agenda Rapat

Rapat dilaksanakan dengan maksud "**Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana**"

2. Jalannya Rapat

a. Pembukaan

- Rapat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 November 2025, dimulai pada pukul 10.00 WIB. Rapat dibuka oleh Bapak RM Ende Dezeanto dan diikuti oleh Tim Penyusun serta programmer melalui daring (aplikasi *google meets*).
- Pimpinan rapat menjelaskan tujuan rapat, yaitu Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana.

b. Pembahasan

- Pemimpin rapat menjelaskan mengenai aplikasi Minaesa Rancak Bana beserta alur prosesnya.
- Diskusi antara tim dengan programmer terkait dengan alur, data base dan format laporan.

3. Penutup

- Rapat ditutup pada pukul 11.05 oleh pimpinan rapat.

Pimpinan Rapat,

RM Ende Dezeanto
NIP. 197812282002121003

Notulis,



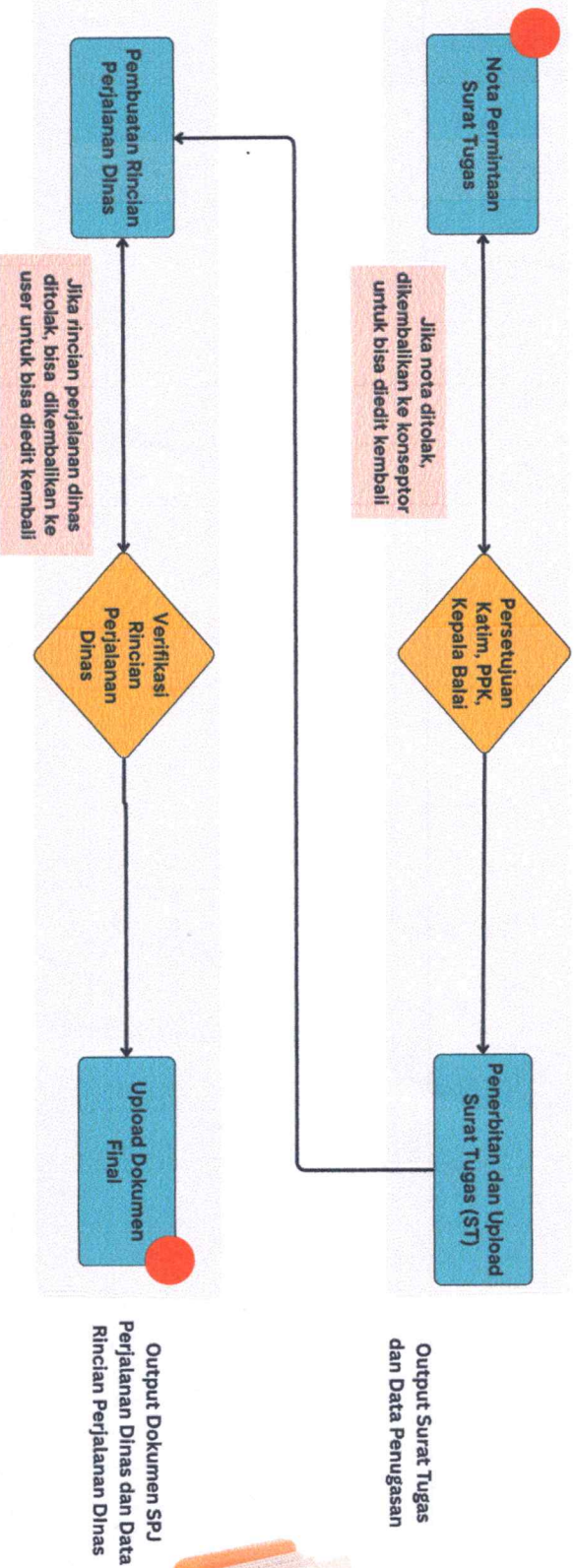
Andi Patria
NIP. 198607122020121001,



BADAN
KARANTINA
INDONESIA

ALUR PROSES BISNIS

Flowchart Aplikasi Rancakbana





BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Nomor : B-3587/TU.01.02/JJ.4/11/2025

14 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana

di

Tempat

Sehubungan dengan telah terbentuknya Tim Efektif Aksi Perubahan Minaesa RancakBana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Senin / 17 November 2025

waktu : pukul 10.00 WIB s/d Selesai

tempat : *Google Meet*

<https://meet.google.com/kam-ahwn-bak>

agenda : Rapat Tim Efektif Lanjutan Pembangunan Aplikasi Minaesa RancakBana

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



RM Ende Dezeanto

NOTULENSI

Hari / tanggal : Senin, 17 November 2025

Waktu : 10.00 WIB s/d 12.30 WIB

Tempat : aplikasi *google meets*

Agenda : Rapat Tim Efektif Lanjutan Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana

1. Agenda Rapat

Rapat dilaksanakan dengan maksud "**Lanjutan Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana**"

2. Jalannya Rapat

a. Pembukaan

- Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 November 2025, dimulai pada pukul 10.00 WIB. Rapat dibuka oleh Bapak RM Ende Dezeanto dan diikuti oleh Tim Penyusun serta programmer melalui daring (aplikasi *google meets*).
- Pimpinan rapat menjelaskan tujuan rapat, yaitu Lanjutan Pembangunan Aplikasi Minaesa Rancak Bana.

b. Pembahasan

- Pemimpin rapat menjelaskan mengenai percobaan dari aplikasi Minaesa Rancak Bana yang telah dikembangkan oleh programmer.
- Diskusi antara tim dengan programmer terkait progress aplikasi dan hasil evaluasi uji coba internal. Beberapa poin yang dibahas :
 - Pak Harianto: membahas mengenai aplikasi yang telah dikembangkan. Ada beberapa masukan yang diminta, misalnya terkait rekap laporan pegawai yang telah melaksanakan perjalanan. Pembatasan nominal berdasarkan SBM yang berlaku.
 - Pak Teguh: meminta rekap secara detail, terkait jumlah perjalanan tiap pegawai beserta besaran nominal.
 - Rendra: meminta agar user dapat menjadi lebih fleksibel, 1 user dapat menjadi sebagai admin dan dapat menjadi pengguna saja. Bukan seperti yang ada, hanya sebagai admin atau sebagai pengguna saja. Dan kewenangan sekretariat dapat melakukan verifikasi ulang dan perbaikan terhadap data pengajuan.

- Pemimpin rapat meminta agar dibentuk agen perubahan yang bertujuan agar dapat membantu menjelaskan ke pegawai lain. Selanjutnya agar dijadwalkan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

3. Penutup

- Rapat ditutup pada pukul 12.30 oleh pimpinan rapat.

Pimpinan Rapat,

RM Ende Dezeanto
NIP. 197812282002121003

Notulis,



Andi Patria
NIP. 198607122020121001



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

Nomor : B-3725/TU.01.02/JJ.4/12/2025

21 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Sosialisasi Aplikasi Minaesa RancakBana

Yth.

Seluruh ASN dan PPNP BKHIT Sumatera Barat

di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi Aplikasi Minaesa RancakBana, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Senin / 24 November 2025

waktu : pukul 07.30 WIB s/d Selesai

tempat : Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat

Jl. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air – Padang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



RM Ende Dezeanto

NOTULENSI

Hari / tanggal : Senin, 24 November 2025

Waktu : 07.30 WIB s/d 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat

Agenda : Sosialisasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana

1. Agenda Rapat

Rapat dilaksanakan dengan maksud **"Sosialisasi Aplikasi Minaesa Rancak Bana"**

2. Jalannya Rapat

a. Pembukaan

- Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat BKHIT Sumatera Barat, dimulai pada pukul 07.45 WIB. Rapat dibuka oleh Bapak RM Ende Dezeanto.
- Pimpinan rapat menjelaskan tujuan rapat, yaitu Aplikasi Minaesa Rancak Bana kepada Pegawai BKHIT Sumatera Barat.

b. Pembahasan

- Pemimpin rapat menjelaskan mengenai Aplikasi Minaesa Rancak Bana, penjelasan terdiri dari Tujuan aplikasi, Manfaat, Alur Proses, Tampilan aplikasi awal dan Tampilan beberapa halaman aplikasi Minaesa Rancak Bana.
- Pemimpin rapat mengharapkan aplikasi Minaesa Rancak Bana dapat digunakan secara menyeluruh mulai tahun 2026.

3. Penutup

- Rapat ditutup pada pukul 09.00 oleh pimpinan rapat.

Pimpinan Rapat,

RM Ende Dezeanto
NIP. 197812282002121003

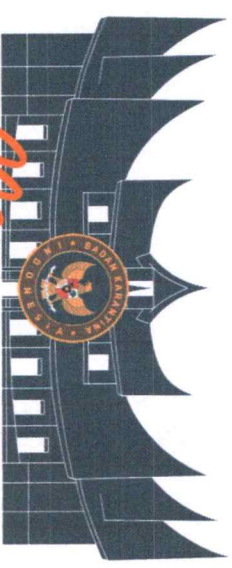
Notulis,



Andi Patria
NIP. 198607122020121001

SOSIALISASI APLIKASI MINAESA RANCAK BANA

BK HIT SUMBAR



MinAESa
RANCAK BANA

(Monitoring Information of National quarantine Single data)
(Transformasi Anggaran, Cerdas, AKuritaBel dan transpbaran)



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

NOTA DINAS
NOMOR: B-3839/TI.01.01/JJ.4/12/2025

Yth : Seluruh ASN dan PPNPN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
Dari : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
Hal : Implementasi Aplikasi Minaesa RancakBana
Tanggal : 1 Desember 2025

Dalam rangka mendorong akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan khususnya perjalanan dinas, bersama ini diberitahukan kepada seluruh pegawai dalam pengajuan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan melalui aplikasi Minaesa RancakBana terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



RM Ende Dezeanto



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216

TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560

WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>

email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
NOMOR 3064 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN MINAESA RANCAKBANA
(Monitoring Information of National quarantine Single data
Transformation of Smart Budget, Accountability and Transparency)
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor, Nomor: B-1298/SM.120/I.6/7/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025, dan surat tugas BKHIT Sumatera Barat Nomor 2668/TU.01.04/JJ.4/09/2025 tentang Penugasan Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025 dengan Metode Blended Learning (Distance Learning dan Klasikal) di Komplek Surya BBPMKP Jl. Raya Puncak KM 11 Ciawi-Bogor di Jawa Barat pada tanggal 15 September 2025 s.d 10 Desember 2025.
- b. bahwa sesuai poin a di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif untuk membantu yang bersangkutan menyelesaikan aksi perubahan dan inovasi pada Aplikasi MinaEsa RancakBana di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor, Nomor: B-1298/SM.120/I.6/7/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan

Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025.

3. Surat Tugas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nomor 751/KP.310/H/06/2025 Tanggal 12 Juni 2025 Penugasan Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025 dengan metode Blended Learning (distance learning dan klasikal) di Komplek Surya BBPMKP Jl. Raya Puncak KM 11 Ciawi – Bogor.

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor, Nomor: B-1298/SM.120/I.6/7/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN MINAESA RANCAKBANA (Monitoring Information of National quarantine Single data tRansformasi ANggaran Cerdas, AKuntaBel dan trANspAran) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT.

KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai bagian dari Tim Efektif untuk aksi perubahan dan inovasi pada Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang mengambil lokasi pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2025
KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT,



RM ENDE DEZEANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN MINAESA RANCAKBANA (Monitoring Information of National Quarantine Single data Transformation ANggaran Cerdas, AKuntaBel dan trANspAran) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

No	Jabatan	Nama/NIP	Uraian Tugas
1.	Mentor	N. Prayatno Ginting, S.P, M.M	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan aksi perubahan dan implementasi aksi perubahan
2.	<i>Project Leader</i>	RM Ende Dezeanto, S.St.Pi	Merencanakan dan memastikan pelaksanaan aksi perubahan dan implementasi aksi perubahan
3.	Sekretaris	Muhammad Halim, S.E, M.M	1. Membantu administrasi pelaksanaan kegiatan 2. Membantu mendokumentasikan dan mengarsipkan aksi perubahan 3. Membantu membuat laporan akhir aksi perubahan
4.	Tim Teknis	- drh. Harianto - Teguh Usahawan, S.Pi - Clifferno, S.Kom - Andi Patria, S.Pi - Abdurrahman Naufal, A.Md.I.Kom - Rendra Syafputra	1. Merancang SOP dan tata alir penggunaan aplikasi Minaesa RancakBana 2. Memastikan aplikasi Minaesa RancakBana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 3. Melakukan pendampingan dalam penambahan fitur pada aplikasi Minaesa RancakBana 4. Membuat laporan rancangan aksi perubahan aplikasi Minaesa RancakBana

			5. Membantu melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa
5.	Tim Administrasi	- drh. Handito Kurniyadi, M.Sc - Al Akhmad, S.Kom - Edriati, S.TP - Suwarseh, S.E, M.M	Melakukan pengelolaan dan alokasi anggaran rencana aksi perubahan

KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT,



RM ENDE DEZEANTO



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR NO. 267, MATA AIR - PADANG 25216
TELEPON/FAKSIMILE : (0751) 62560
WEBSITE : <https://sumaterabarat.karantinaindonesia.go.id/>
email : karantinasumbar@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT
NOMOR 3698 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN MINAESA RANCAK BANA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor, Nomor: B-1298/SM.120/I.6/7/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025 dengan Metode Blended Learning (Distance Learning dan Klasikal) di Komplek Surya BBPMKP Jl. Raya Puncak KM 11 Ciawi-Bogor di Jawa Barat pada tanggal 15 September – 10 Desember 2025.
- b. bahwa sesuai poin a di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Agen Perubahan Minaesa Rancak Bana dalam rangka pendampingan pengoperasian aplikasi untuk pegawai lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor, Nomor: B-1298/SM.120/I.6/7/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025;
3. Surat Tugas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nomor 751?KP.310/H/06/2025

tanggal 12 Juni 2025 perihal Penugasan Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025 dengan Metode Blended Learning (distance learning dan klasikal) di Komplek Surya BBPMKP Jl. Raya Puncak KM 11 Ciawi - Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN MINAESA RANCAK BANA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai bagian dari Tim Agen Perubahan Minaesa Rancak Bana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dengan tugas menjembatani perluasan informasi dan membantu pegawai lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dalam pengoperasian aplikasi Minaesa Rancak Bana.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2025
KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT,



RM ENDE DEZEANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AGEN PERUBAHAN MINAESA
RANCAK BANA BALAI KARANTINA
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SUMATERA BARAT

No.	Nama/NIP	Bidang	Lokasi
1.	Sri Budiyantri R., S.P, M.P NIP 198106112008012009	Tim Kerja Karantina Tumbuhan	Kantor Induk
2.	Al Akhmad, S.Kom NIP 197810202008121002	Subbagian Umum	
3.	Clifferno, S.Kom NIP 198312042009011003	Subbagian Umum	
4.	Doni Warsito, S.H NIP 198106202008121001	Tim Kerja Penegakan Hukum	
5.	Andi Patria, S.Pi NIP 198607122020121001	Tim Kerja Karantina Ikan	
6.	Hanif Nalas Wafi NIP 199806212020121002	Tim Kerja Karantina Hewan	
7.	Sarben, S.Pi NIP 197312312002121010	Tim Kerja Karantina Ikan	Satpel BIM
8.	Ade Syahputra, S.P, M.Si NIP 197901102008011005	Tim Kerja Karantina Tumbuhan	
9.	drh. Deny Juniwati, M.Si NIP 198906162014032005	Tim Kerja Karantina Hewan	

KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT,



RM ENDE DEZEANTO